

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2014

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

KATA PENGANTAR



Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Tahun 2014 dapat diselesaikan. LKIP merupakan pertanggungjawaban Ditjen Aptika dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK).

Dalam Laporan ini diuraikan tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup keberhasilan dan hambatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masukan-masukan yang berguna bagi pengembangan program dan kegiatan serta efisiensi dan efektifitas pada masa yang akan datang.

Disadari bahwa diperlukan komitmen, kerja keras dan kerjasama segenap jajaran Ditjen Aptika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan visi dan misi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Maka untuk selanjutnya diharapkan semakin banyak kegiatan di lingkungan Ditjen Aptika yang lebih terukur dan lebih tajam *outcomenya* sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Kami berharap agar LKIP ini dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dan mewakili atas penilaian kinerja Ditjen Aptika Tahun 2014. Atas peran serta dan kerja keras seluruh jajaran Ditjen Aptika selama tahun 2014, yang telah memungkinkan terlaksananya tugas dan fungsi yang diemban, diucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2015
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'BHT', with a horizontal line underneath.

Bambang Heru Tjahjono

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKIP) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2014 melaporkan capaian dari Indikator Kinerja Utama dimaksud yang diwujudkan dengan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 dengan mengacu pada sasaran Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2010 – 2014 dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010 – 2014.

Renstra Ditjen Aptika merumuskan visi, misi dan tujuan Ditjen Aptika selama lima tahun. Dari rumusan tersebut, maka Ditjen Aptika menetapkan dan menyepakati sasaran-sasaran yang tertuang di dalam Renstra Ditjen Aptika. Untuk Tahun 2014, sasaran Ditjen Aptika yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan e-Government secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (M3.S1);
2. Terwujudnya layanan e-Business yang aman, mudah, murah, handal, dan terpercaya di masyarakat baik lingkup domestik maupun internasional (M3.S1);
3. Terselenggaranya fasilitasi dan proses edukasi yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi (M.2, S.1)

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang diamanatkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

(Kemenkominfo) telah dapat diselenggarakan sebagaimana yang direncanakan dengan mengupayakan secara optimal. Adapun capaian keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi ini sepenuhnya diperoleh dari sumber data kinerja pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Dalam LKIP Tahun 2014 ini masih terdapat perbedaan kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan adalah dapat diketahuinya keberhasilan kinerja yang diukur berdasarkan pencapaian sasaran pada tingkat indikator kinerja *outcome*. Karena kondisi data yang tersedia untuk mendukung capaian kinerja tersebut masih belum tersedia atau kurang lengkap, maka dalam LKIP ini hasil pencapaian kinerja sasaran sebagian besar masih digambarkan pada tingkat *output*.

Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2014 rata-rata 97,22 % yang dihitung dengan mengevaluasi tiga indikator utama yaitu :

Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Nilai Rata-rata e-Government Nasional	3	2,6	86,6
Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-Business	300 UKM	300 UKM	100
Jumlah penyelenggara layanan publik yang mengikuti penerapan standar keamanan informasi	80 instansi	84 instansi	105

LKIP Ditjen Aptika Tahun 2014 ini juga melaporkan kegiatan-kegiatan penting lainnya yang telah dilaksanakan selain tiga kegiatan utama di atas. Akuntabilitas keuangan juga dilaporkan pada LKIP ini.

Serapan anggaran Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sampai dengan akhir Desember 2014 (termasuk PHLN) adalah

sebesar Rp. 133.296.445.892,- atau sebesar 88.13%. Ditjen Aptika juga telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 448.470.929,- dari kegiatan pengadaan barang/jasa.

Diharapkan pada tahun berikutnya, seluruh kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dapat mencapai sasaran kinerja berdasarkan indikator *out come*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis Organisasi	3
D. Maksud dan Tujuan	3

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan	4
B. Perjanjian Kinerja	5

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian dan Evaluasi Kinerja	6
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014	6
C. Kegiatan Penting Lain	20
D. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Ditjen Aptika Tahun 2014	50
E. Efisiensi Anggaran	52

BAB V : PENUTUP

53

Lampiran – Lampiran

I. Perjanjian Kinerja Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi di dunia dari masa ke masa di Indonesia. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia selalu mengadopsi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa di mana penggunaan internet mulai menjadi “makanan” sehari-hari yang dikenal dengan teknologi berbasis internet (*internet based technology*).

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dimana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, perusahaan, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan LSM. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan.

Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Banyaknya

sektor kehidupan yang ada diharapkan membuka inovasi baru bagi kita untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Namun semua inovasi tersebut hendaknya harus dibatasi oleh aturan hukum yang jelas.

Dalam usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih dari KKN, maka berdasarkan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres ini kemudian diperkuat dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang intinya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP) merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyalenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ditentukan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah menjadi dasar penyusunan LAKIP selama ini.

Pada tahun 2014, telah disahkan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan di atas, setiap satuan kerja

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Ditjen Aptika merupakan satu unit organisasi eselon I Kemkominfo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang diamanatkan sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kemkominfo di bidang Aplikasi Informatika yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KKOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika tugas pokok Ditjen Aptika adalah : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang aplikasi informatika.

Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen Aptika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang aplikasi informatika;

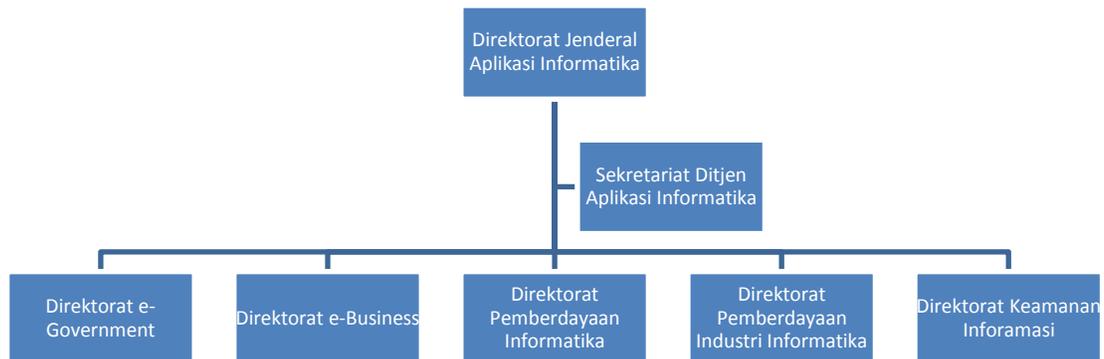
diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat LKIP.

LKIP adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berkewajiban pula untuk menyusun laporan tersebut.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang aplikasi informatika;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang aplikasi informatika;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang aplikasi informatika;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Ditjen Aptika memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Setdijten Aptika);
2. Direktorat e – Government (Dit. e-Gov);
3. Direktorat e – Business (Dit e-Business);
4. Direktorat Pemberdayaan Informatika (Dit. PI);
5. Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika (Dit. PII); dan
6. Direktorat Keamanan Informasi (Dit. Kaminfo).



C. Aspek Strategis Organisasi

Ditjen Aptika yang merupakan salah satu unit organisasi eselon I di Kemkominfo memiliki kedudukan yang penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) dan masyarakat Indonesia yang berkualitas dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan dan pendayagunaan serta penyusunan regulasi dan kebijakan bidang aplikasi informatika.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ditjen Aptika diamanatkan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada peningkatan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi

masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbasis informasi dengan mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi.

Terdapat 6 (enam) kegiatan yang dilaksanakan Ditjen Aptika Pada Tahun 2014, yaitu : (1). Pembinaan dan Pengembangan e-Bisnis; (2) Pembinaan dan Pengembangan e-Government; (3). Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika; (4). Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat; (5) Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pembuatan laporan ini adalah memberikan informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Ditjen Aptika yang akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Aptika selama tahun 2014. Dengan demikian terkait dengan adanya informasi tentang keberhasilan

maupun kegagalan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Ditjen Aptika, diharapkan akan dapat menjadi tolok ukur dan bahan penting dalam menyusun perencanaan, menentukan kebijakan serta pembuatan keputusan untuk masa yang akan datang.

A. PERENCANAAN

Bertolak dari Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yaitu : *Terwujudnya Indonesia informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI*, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) membuat perencanaan strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Aptika Tahun 2010 – 2014.

Di dalam Renstra tersebut Ditjen Aptika merumuskan visi yaitu : *Terwujudnya dunia maya yang sehat, aman, handal, dan terpercaya untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan nasional*. Visi ini selanjutnya dijabarkan ke dalam misi yaitu ; (1). Menyediakan kebijakan dan regulasi bidang TIK; (2). Mewujudkan Pendayagunaan dunia maya yang sehat, aman, handal, dan terpercaya untuk semua sektor. ; (3). Menciptakan dunia maya yang konstruktif dan produktif sehingga memberikan nilai tambah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta (4). Meningkatkan kerjasama dan kemitraan nasional dan internasional dalam pendayagunaan aplikasi informatika.

Kemudian misi tersebut dijabarkan dalam tujuan yang akan dicapai yaitu : (1). Tersedianya kebijakan dan regulasi bidang TIK yang mendorong pertumbuhan ekonomi, partisipasi masyarakat dan keutuhan wilayah NKRI dengan target pencapaian tersedianya peraturan pemerintah yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan-peraturan Menteri yang menjadi petunjuk pelaksanaan operasional; (2). Meningkatkan akses informasi dan penanganan kesenjangan digital dengan pendayagunaan TIK secara sehat dan aman, dengan indikator semakin minimnya akses terhadap konten negatif, meningkatnya kesadaran pemanfaatan untuk tujuan yang konstruktif dan edukatif; (3). Meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan TIK nasional; (4). Meningkatkan ketersediaan layanan e-Government yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan dalam mewujudkan transparansi dan kepercayaan masyarakat; (5). Meningkatkan layanan e-business dan transaksi elektronik melalui transformasi dan kegiatan konvensional menuju kegiatan berbasis elektronik yang bersifat aman, mudah, murah, handal, dan terpercaya; (6). Meningkatkan kemitraan industri aplikasi informatika melalui peningkatan kemampuan dan kehandalan lokal; (7). Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan TIK untuk kesejahteraan ekonomi dan pencerdasan masyarakat; (8). Meningkatkan kerjasama dan kemitraan TIK nasional dan internasional serta citra TIK nasional dalam dunia maya; dan (9). Menempatkan kepentingan nasional dalam penerapan aplikasi informatika. Dari rumusan visi, misi dan tujuan tersebut, maka Ditjen Aptika menetapkan dan menyepakati sasaran-sasaran yang tertuang di dalam Renstra Ditjen Aptika. Untuk Tahun 2014, sasaran Ditjen Aptika yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan e-Government secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (M3.S1);

2. Terwujudnya layanan e-Business yang aman, mudah, murah, handal, dan terpercaya di masyarakat baik lingkup domestik maupun internasional (M3.S1);
3. Terselenggaranya fasilitasi dan proses edukasi yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi (M.2, S.1);

Sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan atau capaian program dan kegiatan Ditjen Aptika telah dirumuskan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Aptika 2010-2014 yaitu:

1. Meningkatnya perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi e-government pada instansi pemerintah pusat dan daerah ;

2. Meningkatnya perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan dan keberagaman layanan aplikasi e-Business terutama bagi pelaku usaha kecil menengah / UKM dll ;
3. Meningkatnya keteraturan, ketertiban dan keamanan informasi dan transaksi elektronik;
4. Meningkatnya produktifitas pemanfaatan sarana dan prasarana aplikasi informatika pada kegiatan ekonomi dan peradaban.
5. Meningkatnya mitra industri informatika dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat dan memperluas pemanfaatan produk lokal aplikasi informatika.
6. Bertambahnya jumlah produk regulasi yang mendukung bidang TIK.

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai langkah awal, untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 oleh masing-masing Satker eselon II dilingkungan Ditjen Aptika yang selanjutnya ditetapkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) masing-masing

satker eselon II dan kemudian dipilih menjadi Perjanjian Kinerja Ditjen Aptika tahun 2014 sebagai indikator kinerja yang merepresentasikan kegiatan pokok di Ditjen Aptika sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan e-Government secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (M.3.S.1)	Nilai Rata-rata e-Government Nasional	3
2	Terwujudnya layanan e-business yang aman, mudah, murah, handal dan terpercaya di masyarakat baik lingkup domestik maupun internasional (M3.S2)	Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-Business	300 UKM
3	Terselenggaranya fasilitasi dan proses edukasi yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi (M.2, S.1)	Jumlah penyelenggara layanan publik yang mengikuti penerapan standar keamanan informasi	80 Instansi

Untuk melaksanakan Rencana Kinerja tahun 2014, sesuai dengan DIPA Nomor-059.04-01.664262/2014 tanggal 5 Desember 2013

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 151.243.859.000,- (Setelah Revisi-07 + Tunjangan Kinerja + Hibah + GPOBA).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Pengukuran Capaian dan Evaluasi Kinerja

Sepanjang Tahun 2014 Ditjen Aptika telah melaksanakan kegiatan- kegiatan untuk mendukung capaian 3 (tiga) sasaran strategis Ditjen Aptika. Kegiatan-kegiatan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Setitjen Aptika Tahun 2014 sebagai komitmen terhadap rencana kinerja yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Pengukuran, evaluasi, dan analisis yang disajikan dalam LAKIP ini diupayakan untuk memberikan informasi yang diarahkan pada tatanan indikator *out come* dan benefit kepada masyarakat dan *stake holder*. Capaian keberhasilan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi ini sepenuhnya diperoleh dari sumber data masing-masing Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Ditjen Aptika. Pembahasan akan dilakukan dengan mengevaluasi hasil Capaian Kinerja Tahun 2014 serta perbandingan dari tahun 2009.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014

Adapun hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja Ditjen Aptika dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan e-Government secara efektif,efisien,tranparan dan akuntabel (M.3, S.1)

Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Nilai Rata-rata e-Government Nasional dicapai melalui: 1. Asesment tingkat Kementerian se-Indonesia; 2. Asesment tingkat Lembaga Provinsi non Kementerian se-Indonesia; 3. Asesment tingkat Provinsi se-Indonesia; 4. Asesment tingkat Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Tengah	3	2,6	86,6

Sasaran “terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan e-Government secara efektif, efisien, tranparan dan akuntabel (M.3, S.1)” memiliki indikator kinerja “Nilai Rata-rata e-Government Nasional” merupakan sasaran Ditjen Aptika dan digunakan untuk mengukur sasaran Kementerian Kominfo “mengembangkan sistem komunikasi dan

informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal (S4.4)”.

Kegiatan PeGI ini dilakukan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di tingkat kabupaten dan kota yang terdapat di provinsi

tersebut. PeGI juga dilaksanakan untuk tingkat Kementerian dan Lembaga. PeGI diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di Instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Kemkominfo bekerjasama dengan berbagai kalangan, baik dari unsur komunitas TIK, perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah yang terkait.

Tujuan Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGI), yaitu:

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah;
2. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif; dan
3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

Terkait dengan tujuan pertama, PeGI dirancang untuk dapat menjadi pedoman bagi pengembangan TIK di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan lingkungan pemerintah di Indonesia baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kementerian dan lembaga non kementerian dapat mengembangkan dan memanfaatkan TIK secara lebih terarah.

PeGI juga menjadi salah satu upaya penyebarluasan informasi dan rekomendasi terkait peningkatan peran TIK diantara instansi pemerintah dan menjadi langkah untuk mempermudah hubungan koordinasi dan keterpaduan implementasi e-Government antar instansi atau satuan kerja instansi pemerintah.

Terdapat lima dimensi yang menjadi Indikator dalam tahapan penilaian pelaksanaan PeGI yaitu: Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan. Masing-masing

dimensi memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang Hasil dari kegiatan PeGI adalah peta kondisi kesiapan penerapan e-government yang terbagi dalam empat kategori yaitu: sangat kurang, kurang, baik, dan sangat baik. Selain itu, juga disertakan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh masing-masing K/L/Pemda.

PeGI dimulai tahun 2007 yang melibatkan 11 Provinsi, tahun 2008 diikuti 27 provinsi. Lalu di tahun 2009, dilakukan PeGI di tingkat Kementerian/Lembaga yang diikuti oleh 27 K/L.

Di tahun 2010, dilakukan evaluasi terhadap penerapan e-government terhadap 95 Kab/Kota di lima provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Riau. Di tahun 2011, dilakukan PeGI untuk tingkat provinsi yang diikuti oleh 25 provinsi, serta PeGI untuk tingkat Kab/Kota di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Aceh.

Di tahun 2012, telah dilakukan PeGI di 24 provinsi, 164 Kab/Kota dan 29 Kementerian. Pada tahun 2013 Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGI) termasuk dalam program pemerintah dalam mendorong percepatan Reformasi Birokrasi khususnya di instansi pemerintah pusat serta sebagai Prioritas Nasional Utama dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Pada Tahun 2014 Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGI) diselenggarakan untuk tingkat Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Provinsi serta Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, PeGI 2014 juga diselenggarakan untuk tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Riau,

Kepulauan Riau, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Papua Barat.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kementerian	2.5	-	2.5	2.5	2.7	2.7
LPNK	-	-	-	-	2.7	2.7
Provinsi	-	-	2.4	2.2	2.6	2.4
Kabupaten/Kota	-	2.0	2.0	2.2	2.7	2.4
Rata-rata nilai PeGI	2.5	2.0	2.3	2.3	2.7	2.6

Hasil penilaian PeGI Tahun 2009-2014

Target nilai rata-rata PeGI tahun 2014 adalah 3,0 dan tercapai sebesar 2,6 atau sebesar 86,6%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan :

1. belum adanya regulasi yang mengatur langsung terkait kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan e-government baik di pemerintah pusat maupun daerah;
2. struktur kelembagaan daerah yang menggabungkan Dinas Kominfo dengan dinas lain menyebabkan tidak efektifnya

penyeleggaran e-government di daerah; dan

3. masalah kurangnya SDM di daerah yang mempunyai kemampuan atau kompetensi dalam implementasi e-government.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan secara nasional serta penyediaan infrastruktur e-government untuk pemerintah daerah. Serapan anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.347.048.900,- dari pagu sebesar 3.900.000.000 atau sebesar 85,82%.



Assesment PeGI wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Papua Barat di Makassar, 2014



Assesment PeGI tingkat LPNK di Bogor, 2014

Adapun tabel PeGI tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Jawa Tengah pada Tahun 2014

NO	KABUPATEN/KOTA	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKA N	KELEMBA GAAN	INFRASTR UKTUR	APLIKASI	PERENCAN AAN		
1	Kota Pekalongan	3.5	3.47	3.14	3.53	3.6	3.45	Baik
2	Kabupaten Sragen	3.29	3.07	3.14	3.17	3.33	3.2	Baik
3	Kabupaten Sukoharjo	2.71	2.8	2.67	2.7	2.67	2.71	Baik
4	Kabupaten Batang	2.5	2.53	2.38	2.57	2.53	2.5	Baik
5	Kabupaten Kebumen	2.17	2.53	2.19	2.4	2.2	2.3	Kurang
6	Kabupaten Banyumas	2.54	2.33	2.05	2.23	2.27	2.28	Kurang
7	Kabupaten Kendal	1.92	2.93	2.05	2.17	2.27	2.27	Kurang
8	Kabupaten Kudus	2.04	2.33	2.62	2.27	2	2.25	Kurang
9	Kota Surakarta	1.67	1.93	2.57	2.7	2.27	2.23	Kurang
10	Kabupaten Rembang	2.13	2.13	1.95	2.3	2.47	2.2	Kurang
11	Kabupaten Demak	2.21	2.47	2.1	2.2	2	2.19	Kurang
12	Kabupaten Banjarnegara	2.08	2.13	2.38	2.07	2	2.13	Kurang
13	Kota Semarang	2.21	2.27	1.67	2.33	2.13	2.12	Kurang
14	Kota Magelang	1.79	2.13	2	2.27	2.33	2.11	Kurang
15	Kabupaten Wonogiri	1.92	2.33	1.95	2.23	2.07	2.1	Kurang
16	Kabupaten Purworejo	1.96	1.73	2.24	2.13	2.4	2.09	Kurang
17	Kabupaten Karanganyar	1.88	2.2	2.33	2.23	1.67	2.06	Kurang
RATA-RATA		2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	Kurang

PeGI Tingkat Kementerian pada Tahun 2014

NO	KABUPATEN/KOTA	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Kementerian Keuangan	3.54	3.6	3.67	3.5	3.53	3.57	Sangat Baik
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	3.29	3.53	3.52	3.6	3.2	3.43	Baik
3	Kementerian Luar Negeri	3.13	3.4	3.36	3.25	3.4	3.31	Baik
4	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	3.25	3.27	3.38	3.2	3.2	3.26	Baik
5	Kementerian Pekerjaan Umum	2.96	3.27	3.43	3	3.13	3.16	Baik
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.13	3.4	2.95	3.17	2.8	3.09	Baik
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.75	3.2	3.29	3	2.9	3.03	Baik
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.83	3.13	3.29	2.83	2.8	2.98	Baik
9	Kementerian Perdagangan	2.92	2.87	3.1	3.03	2.87	2.96	Baik
10	Kementerian Kesehatan	2.79	2.93	3.14	3	2.87	2.95	Baik
11	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.79	2.8	3.24	2.93	2.87	2.93	Baik
12	Kementerian Badan Usaha Millik Negara	2.75	3.1	2.86	2.9	3	2.92	Baik
13	Kementerian Pertanian	3	2.53	2.95	2.93	3.07	2.9	Baik
14	Kementerian Sekretariat Negara	2.92	3.07	2.57	2.97	2.53	2.81	Baik
15	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.42	2.4	2.67	2.57	2.53	2.52	Baik
16	Kementerian Kehutanan	2.21	2.4	2.76	2.77	2.27	2.48	Kurang
17	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.96	2.73	2.57	2.5	2.6	2.47	Kurang
18	Kementerian Agama	2.38	2.8	2.79	2.55	1.7	2.44	Kurang
19	Kementerian Riset dan Teknologi	2.29	2.27	2.71	2.47	2.2	2.39	Kurang
20	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2.21	2.53	2	2.43	2.6	2.35	Kurang
21	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	2.25	2.33	2.24	2.3	2.53	2.33	Kurang
22	Kementerian Perhubungan	2.29	2.33	2.14	2.17	2.4	2.27	Kurang
23	Kementerian Sosial	2	2.33	2.24	2.63	2	2.24	Kurang
24	Kementerian Lingkungan Hidup	2	2.33	2.29	2.37	2.2	2.24	Kurang
25	Kementerian Pertahanan	2.42	2.33	2.05	2	2.33	2.23	Kurang
26	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.04	2.13	2.43	2.33	2.13	2.21	Kurang
27	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.92	2	2.19	2.47	2.2	2.15	Kurang
28	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1.63	2	1.71	2.9	2	2.05	Kurang
RATA-RATA		2.6	2.8	2.8	2.8	2.6	2.7	Baik

PeGI Tingkat LPNK pada Tahun 2014

NO	LPNK	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAG AAN	INFRASTR UKTUR	APLIKASI	PERENCAN AAN		
1	Badan Pusat Statistik (BPS)	3.08	3.4	3.1	3.2	3	3.16	Baik
2	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	3.17	3	3.33	2.97	3.07	3.11	Baik
3	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI)	3.13	2.87	3.29	2.97	3.13	3.08	Baik
4	Badan Informasi Geospasial (BIG)	2.71	3.2	3.05	2.87	3.07	2.98	Baik
5	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	2.88	3	3.1	3.17	2.53	2.93	Baik
6	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	2.88	2.93	2.62	2.57	3.13	2.83	Baik
7	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)	2.75	3.07	2.86	2.5	2.93	2.82	Baik
8	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	2.5	3.13	2.81	2.93	2.6	2.8	Baik
9	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	2.5	2.87	3	2.57	2.73	2.73	Baik
10	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	2.54	2.87	2.62	2.63	2.67	2.67	Baik
11	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	2.5	2.53	2.57	3.03	2.67	2.66	Baik
12	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	2.08	2.8	2.81	2.9	2.6	2.64	Baik
13	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	2.58	2.53	2.52	2.73	2.53	2.58	Baik
14	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	2.33	2.8	2.9	3.03	1.8	2.57	Baik
15	Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN)	2.17	2.8	2.52	2.73	2.53	2.55	Baik
16	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	2.53	2.5	2.54	2.5	2.45	2.5	Baik
17	Badan Kepegawalan Negara (BKN)	2.25	2.73	2.52	2.67	1.93	2.42	Kurang
18	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	1.67	2.67	2.52	2.77	2.33	2.39	Kurang
19	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	1.83	2.53	2.95	2.53	1.53	2.28	Kurang
20	Badan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	1.88	2.27	2.67	2.8	1.6	2.24	Kurang
RATA-RATA		2.5	2.8	2.8	2.8	2.5	2.7	Baik

PeGI Tingkat Provinsi pada Tahun 2014

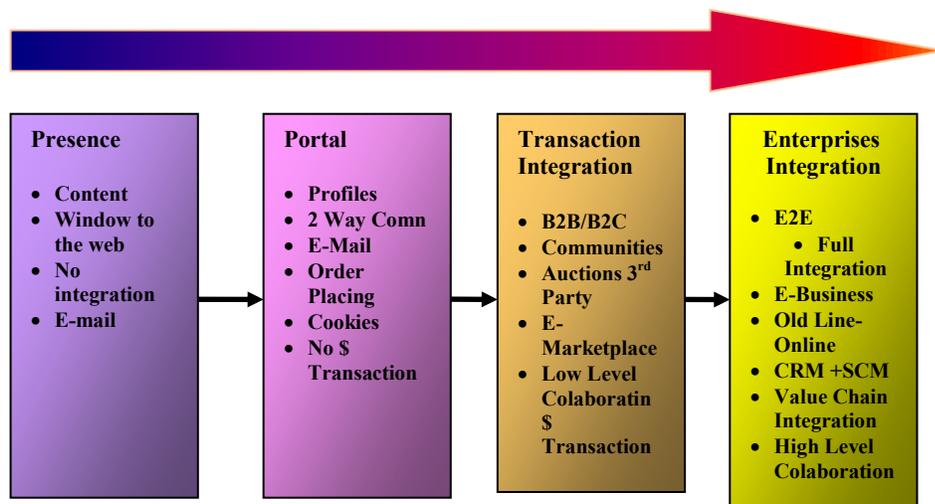
NO	PROVINSI	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAG AAN	INFRASTR UKTUR	APLIKASI	PERENCAN AAN		
1	DKI Jakarta	3.04	3.13	3.14	3.3	2.8	3.08	Baik
2	Jawa Barat	2.88	3.2	2.95	3.13	2.87	3.01	Baik
3	Jawa Timur	3.08	3.13	2.9	2.73	2.6	2.89	Baik
4	D.I. Yogyakarta	2.79	2.93	2.95	2.8	2.93	2.88	Baik
5	Jawa Tengah	2.67	2.67	2.76	2.87	2.67	2.73	Baik
6	Gorontalo	2.67	2.8	2.62	2.57	2.6	2.65	Baik
7	Bali	2.63	2.53	2.52	2.8	2.73	2.64	Baik
8	Sumatera Utara	2.67	2.67	2.38	2.53	2.8	2.61	Baik
9	Aceh	2.33	2.67	2.67	2.6	2.53	2.56	Baik
10	Kalimantan Timur	2.71	2.53	2.1	1.93	1.93	2.24	Kurang
11	Bangka Belitung	2.13	2.6	2.05	2.57	1.8	2.23	Kurang
12	Riau	2.21	2.53	2.14	2.17	1.93	2.2	Kurang
13	Nusa Tenggara Barat	1.96	2.2	2.24	2.3	2	2.14	Kurang
14	Sumatera Selatan	1.71	2.13	2.19	2.43	1.8	2.05	Kurang
15	Kalimantan Barat	1.5	2.2	2.14	2.6	1.8	2.05	Kurang
16	Sumatera Barat	2.04	2.13	1.9	2.3	1.67	2.01	Kurang
17	Kalimantan Tengah	2.42	1.93	1.62	2.2	1.67	1.97	Kurang
18	Lampung	1.92	2	1.95	1.97	1.6	1.89	Kurang
RATA-RATA		2.4	2.6	2.4	2.5	2.3	2.4	Kurang

2. Terwujudnya layanan e-business yang aman, mudah, murah, handal dan terpercaya di masyarakat baik lingkup domestik maupun internasional (M.3, S.2)

Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-Business	300 UKM	300 UKM	100

Pernyataan UKM sebagai tulang punggung perekonomian bangsa telah memunculkan sebuah konsekuensi bagi pemerintah agar mengupayakan bagaimana perdagangan di era pasar terbuka harus dapat digarap juga oleh para pelaku UKM. Dalam perdagangan di dunia nyata (real market) dan terlebih lagi perdagangan di dunia maya (cyber market) yang saat ini telah menjadi pasar yang sangat potensial. Upaya nyata yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan bantuan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pelaku UKM di Indonesia untuk dapat berperan serta aktif dalam perkembangan kemajuan perdagangan tersebut sehingga dapat mengkokohkan keberadaan mereka sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Upaya akan hal tersebut telah dijadikan salah satu target indikator kinerja dari direktorat e-Business dengan melakukan

fasilitasi baik dalam bentuk bantuan penyediaan Infrastruktur maupun pembangunan kemampuan “softskill” yang diperuntukkan khusus bagi pelaku UKM dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis mengenai pemanfaatan TIK. Bimbingan tersebut dimaksudkan untuk mendukung kemajuan usaha para pelaku UKM serta meningkatkan jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-Business. Penerapan aplikasi e-Business yang dijadikan dalam pencapaian kinerja tersebut merujuk kepada publikasi hasil riset / penelitian mengenai model tahapan pengembangan e-commerce bagi UKM yang dikemukakan Rao et.al (2003). Dalam publikasi riset tersebut model tahapan pengembangan e-commerce bagi UKM ini dibagi menjadi 4 (empat) tahapan utama, seperti tertera pada gambar berikut :



Model Tahapan Pengembangan e-commerce bagi UKM (Rao, et.al 2003)

Merujuk pada model tahapan tersebut maka upaya awal pencapaian target penerapan aplikasi *e-business* di tingkat UKM, dengan menjalankan pencapaian model tahapan awal “*Presence*” melalui penyelenggaraan beberapa fasilitasi kegiatan dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis kepada

para pelaku UKM dalam memulai masuk dalam lingkungan digital atau dunia *e-commerce* dengan target para pelaku UKM tersebut memiliki “*Window to the Web*” sesuai rekomendasi riset dari Rao, et.al (2003).



Bimtek Aplikasi e-Business di Kota Cirebon (29-30 April 2014) dan Kota Kudus (10-11 September 2014)

Target output yang didesain dari kegiatan ini diantaranya memberikan pelatihan / bimbingan teknis kepada pelaku UKM dalam memiliki akun surat elektronik atau *email* sebagai alat untuk berkomunikasi di dunia maya dalam konteks perdagangan elektronik pelaku UKM untuk memiliki *website*. Pemanfaatan Web Log atau blog selain memberikan informasi juga sebagai sebuah alternatif *marketing channel* dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki oleh para pelaku UKM.

Target ini menunjang sasaran Ditjen Aptika “terwujudnya layanan *e-business* yang aman, mudah, murah, handal dan terpercaya di masyarakat baik lingkup domestik maupun internasional (M3., S.2)”. Adapun sasaran tersebut menunjang sasaran Kementerian Kominfo “mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang

berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan (S4.3)”.

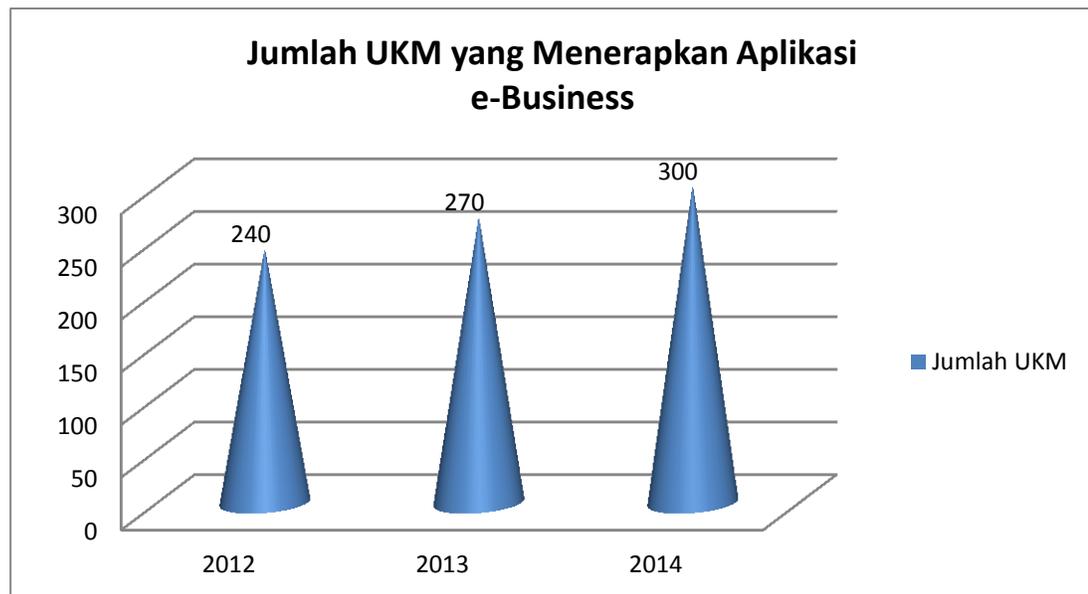
Tahun 2014, target jumlah UKM yang menerapkan aplikasi *e-Business* ditetapkan sejumlah 300 UKM. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UKM di Indonesia yang mencapai lebih dari 52 Juta UKM, maka target ini sangatlah kecil dan masih dalam tataran output. Namun ini merupakan stimulus awal agar para pelaku UKM mulai *aware* dan mulai berpikir tentang pentingnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung perkembangan usahanya.

Target tersebut dicapai melalui pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi *e-business* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 di berbagai kota di Indonesia seperti di bawah ini :

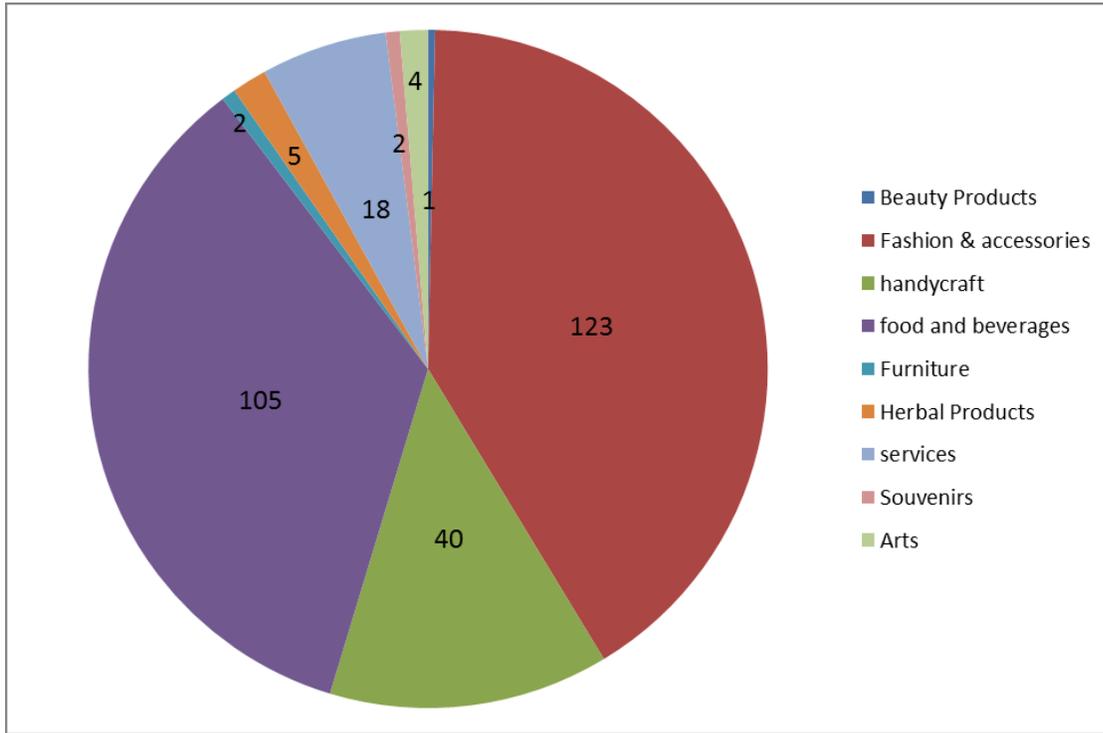
Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Batam	Palembang	Bandar Lampung
Medan	Depok	Tangerang
Jakarta (2 kali)	Bekasi	Cirebon
Bukittinggi	Tangerang Selatan	Sleman
Semarang	Bogor	Kudus
Malang	Bandung	Solo
Banjarmasin	Surabaya	Jambi
	Makassar	Denpasar
	Manado	

Adapun jumlah peserta bimtek dari tahun 2012 adalah sebanyak 240 UKM, tahun 2013

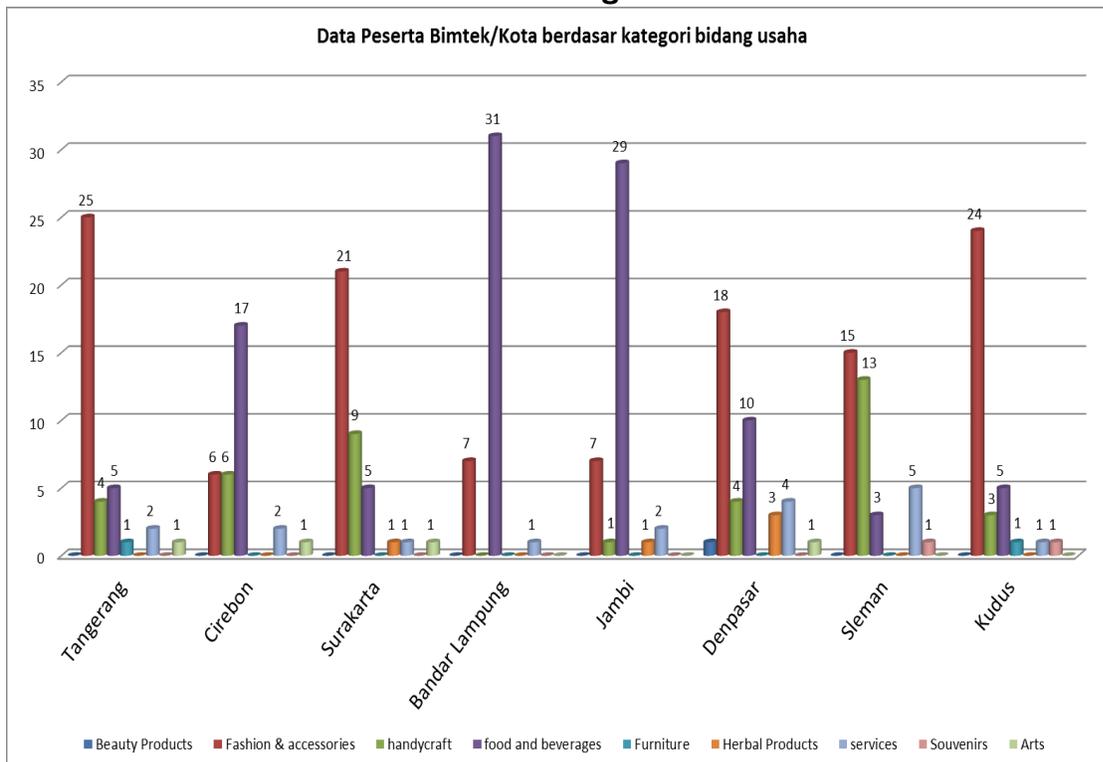
sebanyak 270 UKM, dan tahun 2014 sebanyak 300 UKM.



**Data UKM yang telah menerapkan aplikasi e-business
berdasar bidang usaha Tahun 2014**



**Data UKM yang telah Menerapkan aplikasi e-Business
Berdasarkan Lokasi/Bidang Usaha Tahun 2014**



Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Dengan realisasi

anggaran sebesar 98.15 % sebesar Rp. 1,172,837,200,- dari pagu anggaran sebesar 1.195.000.000,-.

3. Terselenggaranya fasilitasi dan proses edukasi yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi (M.2, S.1)

Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Jumlah penyelenggara layanan publik yang mengikuti penerapan standar keamanan informasi	80 instansi	84 instansi	105

Untuk mengukur sasaran Ditjen Aptika 'terselenggaranya fasilitasi dan proses edukasi yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi (M.2, S.1) dan sasaran Kementerian Kominfo "terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat (S3.2) telah dilaksanakan kegiatan Pemeringkatan Keamanan Informasi (KAMI).

Pemeringkatan Keamanan Informasi (KAMI) dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah di Indonesia telah menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik. Kegiatan ini memberikan kontribusi fundamental dan memberikan dasar atau fondasi bagi terciptanya keamanan akses informasi di setiap instansi pemerintah.

Adapun kegiatan pemeringkatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan evaluasi terhadap indeks keamanan informasi. Evaluasi ini dilakukan melalui kegiatan pengisian aplikasi Indeks Keamanan Informasi. Ditjen Aptika sudah melakukan evaluasi di berbagai daerah yang menjadi target penerapan. Hasil evaluasi indeks KAMI menggambarkan tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan

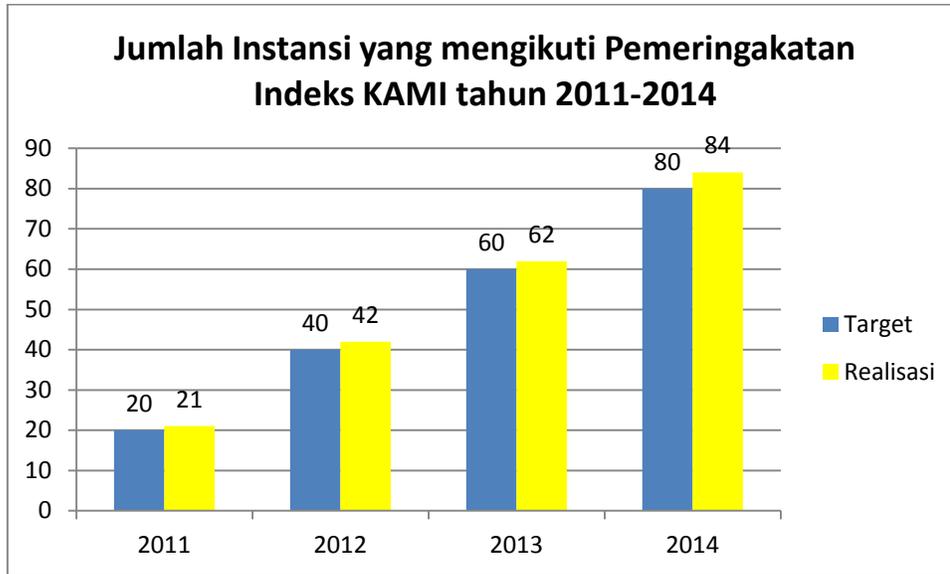
SNI ISO/IEC 27001:2009 dan peta area tata kelola keamanan sistem informasi di instansi pemerintah. Penilaian dalam Indeks KAMI dilakukan dengan cakupan keseluruhan persyaratan pengamanan yang tercantum dalam standar ISO/IEC 27001:2009, yang disusun kembali menjadi 5 (lima) area di bawah ini :

- A. **Tata Kelola Keamanan Informasi.** Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi;
- B. **Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi.** Bagian ini mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi;
- C. **Kerangka Kerja Keamanan Informasi.** Bagian ini mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya;
- D. **Pengelolaan Aset informasi.** Bagian ini mengevaluasi kelengkapan pengamanan terhadap aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut;
- E. **Teknologi dan Keamanan Informasi.** Bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektivitas penggunaan

teknologi dalam pengamanan aset informasi;

TIK untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi instansi.

F. **Peran TIK.** Bagian ini mengevaluasi tingkat ketergantungan terhadap layanan



Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 105% atau tercapai 84 instansi dari target 80 instansi di tahun 2014. Adapun realisasi anggaran adalah sebesar Rp.

1.276.635.800,- (89,60%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.425.445.000,-. Infografis hasil pemeringkatan Indeks KAMI tahun 2014 dapat dilihat seperti di bawah ini :



Pemeringkatan Indeks KAMI di Yogyakarta dan Jakarta tahun 2014

PEMERINGKATAN INDEKS KEAMANAN INFORMASI 2014

PADA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

DAFTAR KEGIATAN

Surat Edaran Menteri KOMINFO No.05/SE/M/KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik Standar Nasional Indonesia 270001 : 2011 tentang Teknologi Informasi - Teknik Keamanan - Sistem Manajemen Keamanan Informasi - Persyaratan

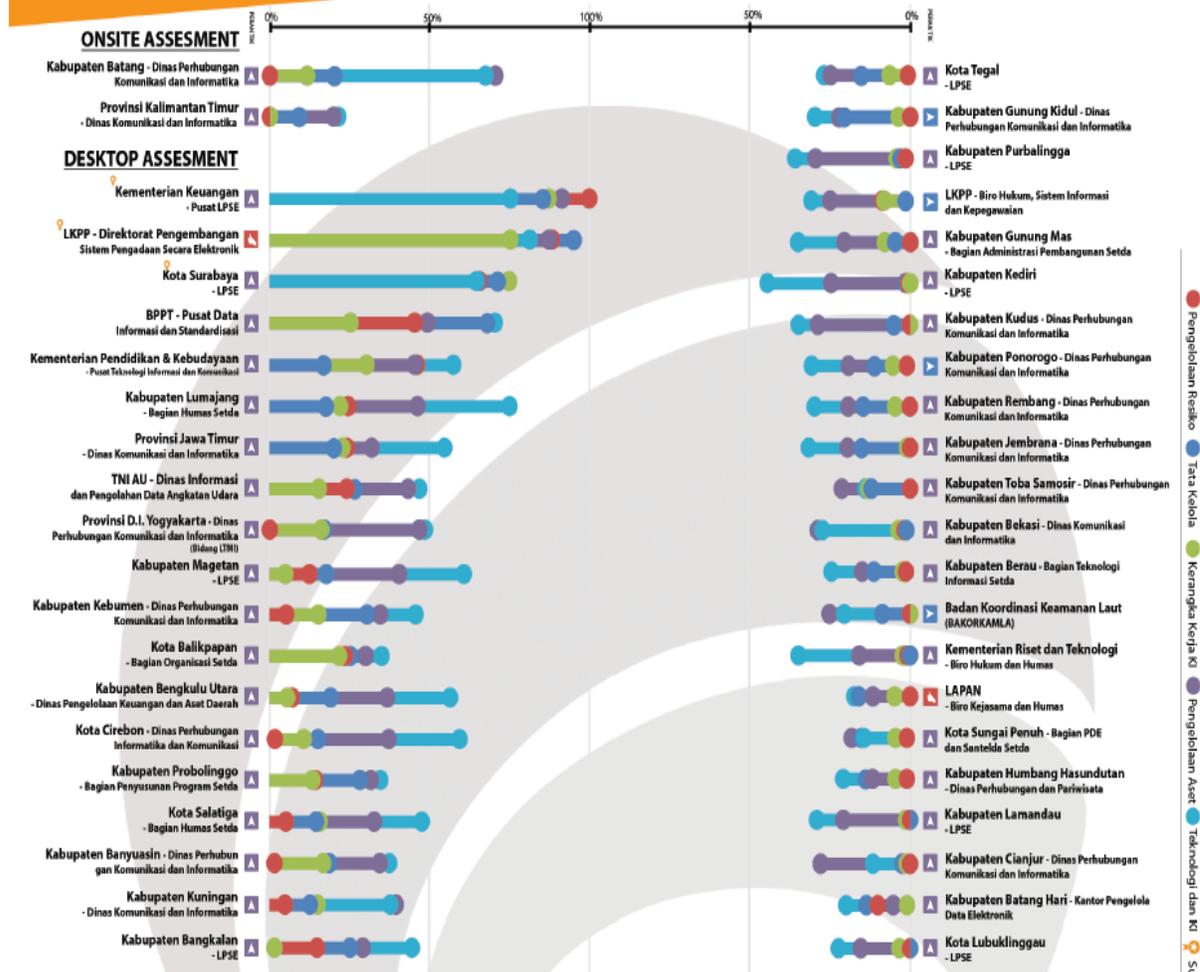
TUJUAN KEGIATAN

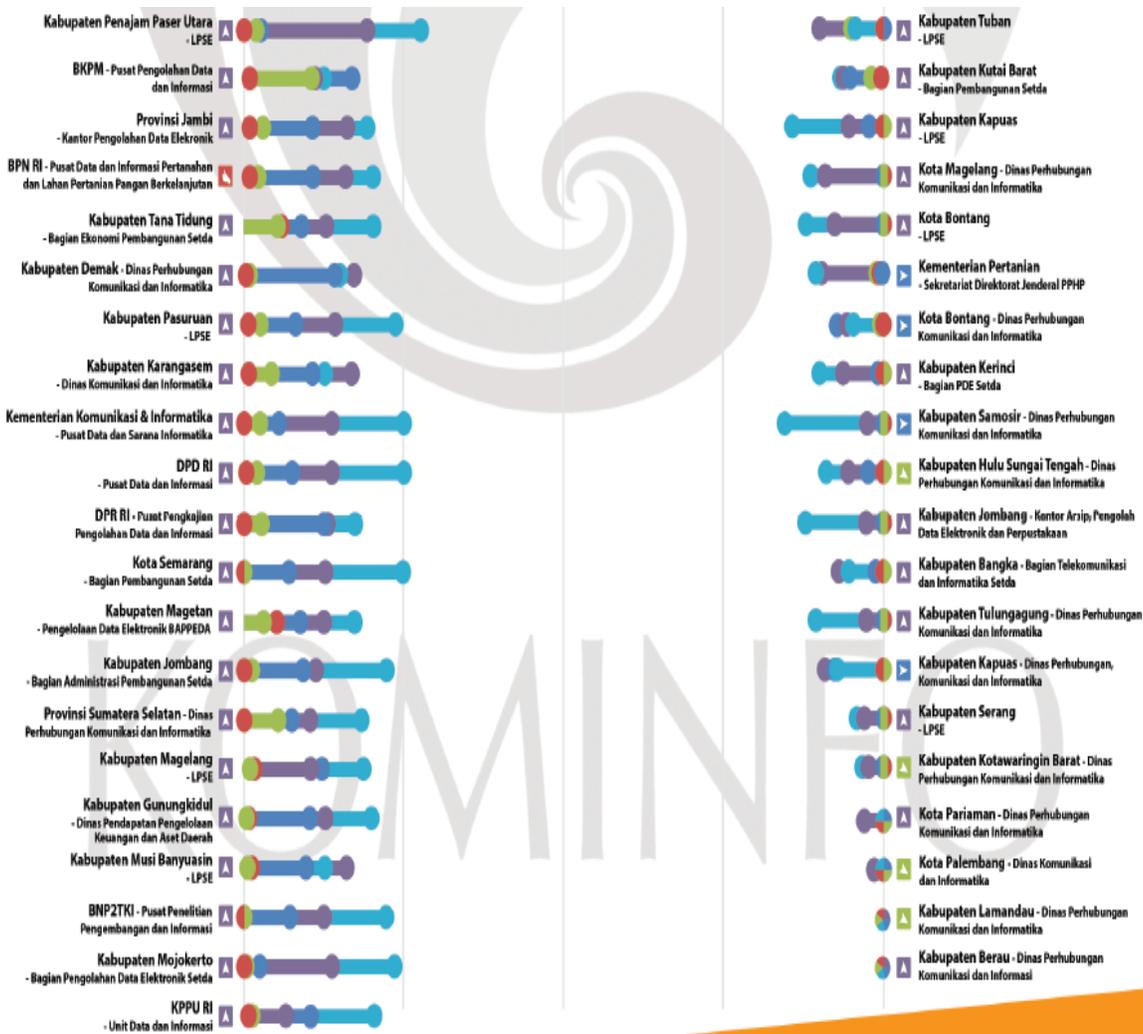
Pemeriksaan keamanan informasi bagi penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan Surat Edaran Menteri KOMINFO No.05/SE/M/KOMINFO/07/2011

JUMLAH TINGKAT PENCAPAIAN (%) PENGAMANAN DARI JUMLAH PENGAMANAN MAKSIMAL DARI SETIAP DAERAH

Pemeriksaan ini merupakan tahap awal kegiatan assesment profil tata kelola keamanan informasi oleh kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah.

84 Sebanyak 84 Instansi yang mengikuti verifikasi pemeriksaan keamanan informasi





C. Kegiatan Penting Lain

Ditjen Aptika mempunyai beberapa kegiatan penting lainnya dan turut mendukung

I. Kebijakan dan regulasi bidang aplikasi dan Informatika

Ditjen Aptika telah melakukan kegiatan pembahasan terhadap 2 RUU yaitu RUU Perubahan UU ITE dan RUU Tata Cara Intersepsi dan 1 RPP yaitu RPP Perlindungan Data Elektronik Strategis (PDES).

pencapaian sasaran Ditjen Aptika antara lain :

RUU Perubahan UU ITE
 Mengingat perkembangan dinamika masyarakat dan teknologi informasi, diperlukan penyempurnaan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar penerapannya lebih

efektif, demi terwujudnya keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum di negeri ini.

Setidaknya ada empat faktor yang melatarbelakangi dilakukannya amandemen terhadap UU ITE, yakni :

1. Adanya keberatan sebagian masyarakat terhadap Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet yang berujung berujung pada *constitutional review* Pasal 27 ayat (3);
2. Adanya keberatan terhadap ancaman sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) yang dinilai memberatkan dan tidak proporsional dengan KUHP; UU ITE dinilai sebagai undang-undang *draconian* yang represif dan mengekang kebebasan berekspresi;
3. Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) UU ITE dinilai menyulitkan aparat penegak hukum; APH seringkali tidak menggunakan hukum acara UU ITE;
4. Adanya pengujian konstiusional terhadap Pasal 31 ayat (4) tentang Pengaturan melalui Peraturan Pemerintah.

Sejak tahun 2010, Pemerintah mulai menyusun Naskah Akademik dan Draft Awal RUU Perubahan UU ITE. Pembahasan dilakukan secara intensif dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi terkait yaitu Mahkamah Agung RI, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Dalam Negeri.

Pada Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011, RUU Perubahan UU ITE masuk pada nomor urutan 69 dari 70 RUU dan pada 2011, Pemerintah terus melakukan pembahasan RUU Perubahan UU ITE di Tim Antarkementerian serta Proses Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Namun ternyata dalam RUU Prioritas 2012, RUU Perubahan UU ITE tidak masuk dalam daftar. Alasan yang disampaikan saat itu adalah bahwa RUU tersebut akan masuk pada Prioritas 2013.

Pada Agustus 2012, Pemerintah telah selesai melakukan proses harmonisasi terhadap RUU Perubahan UU ITE yang ditandai dengan Surat Menteri Hukum dan HAM kepada Menkominfo No: PPE.PP.02-1368 tanggal 16 Agustus 2012, bahwa proses harmonisasi terhadap RUU Perubahan UU ITE telah rampung pada tanggal 16 Agustus 2012. Kemudian dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM pada 9 Desember 2012, disepakati Prolegnas Prioritas 2013 sebanyak 70 RUU dan RUU Perubahan UU ITE masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2013. Namun kemudian pada Rapat Paripurna tanggal 10 Desember 2012, RUU Perubahan UU ITE ditarik dari Prolegnas Prioritas 2013 dan digantikan dengan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sementara RUU Perubahan UU ITE dinyatakan masuk dalam RUU Kumulatif Terbuka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada 10 April 2013, Menteri Koinfo menyampaikan RUU Perubahan UU ITE kepada Presiden untuk diproses lebih lanjut di DPR. Surat tersebut mendapat balasan pada 26 April 2013, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan Surat kepada Menkominfo bahwa mengingat RUU Perubahan UU ITE belum termasuk dalam daftar Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2013, maka RUU perlu dikoordinasikan kembali dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Hukum dan HAM.

Pada tanggal 30 Mei 2013, diselenggarakan Rapat Koordinasi di Kementerian Koinfo

RUU Tata Cara Intersepsi

Pada Tahun 2011, Ditjen Aplikasi Informatika telah menyusun Naskah Akademik dan Draft Awal RUU Tata Cara Intersepsi. Naskah akademik dan draft awal tersebut disusun untuk menjawab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 yang menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengaturan Tata Cara Intersepsi yang semula disiapkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ditingkatkan menjadi Rancangan Undang-Undang dan telah dibahas di Tim antar Kementerian.

Selanjutnya pada **tahun 2012** Rapat Tim Antar Kementerian membahas Naskah Akademik dan Draft RUU Tata Cara Intersepsi. Tim Antar Kementerian Pembahasan RUU Tata Cara Intersepsi terdiri atas Aparat Penegak Hukum (Komisi

membahas RUU Perubahan UU ITE. Hasil Rapat menyatakan bahwa RUU Perubahan UU ITE akan diusulkan menjadi RUU Prolegnas Prioritas 2014. Rapat Koordinasi di Kementerian Hukum dan HAM, 16 Agustus 2013, hasil rapat mengusulkan RUU Perubahan UU ITE untuk dibahas di DPR pada tahun 2014. Rapat Koordinasi di BPHN, 30 September 2013 menetapkan RUU Perubahan UU ITE sebagai salah satu Prioritas Pembahasan 2014.

Tahun 2014, telah dilaksanakan pembahasan di tingkat Tim Antar Kementerian untuk finalisasi RUU Perubahan UU ITE pada tanggal 24 Sept 2014.

Pemberantasan Korupsi, Mabes Polri, Kejaksaan Agung), Operator Telekomunikasi (Telkom, Indosat, XL Axiata), Regulator (Kemkumham, Koinfo, dan BRTI). Hasil yang dicapai pada Rapat Tim Antar Kementerian antara lain: perlu pembentukan Rancangan Keputusan Presiden tentang Pusat Intersepsi Nasional, perlu pengaturan mengenai masa retensi data, dan perlu menjelaskan istilah Aparat Penegak Hukum (APH).

Draft RUU TCI sudah disiapkan dan dalam **tahun 2013** telah dilaksanakan 2 kali pembahasan (Jakarta dan Bandung). Pada tahun 2014, Menteri Koinfo telah menyampaikan Naskah RUU TCI ke Menkumham untuk Harmonisasi, namun dikarenakan terdapat ketidaksepakatan antara anggota tim antar kementerian tentang beberapa pasal sehingga harmonisasi belum di proses lebih lanjut.

Jumlah RPP (RPP Perlindungan Data Elektronik Strategis) yang selesai disusun

RPP Perlindungan Data Elektronik Strategis disusun untuk memenuhi amanat Pasal 40 ayat (6) UU ITE, sebagai bagian dari upaya Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta upaya Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk: menjamin kerahasiaan dan keamanan data strategis, menjamin keutuhan atau integritas data strategis, menjamin ketersediaan data strategis demi kepentingan publik dan/atau Pemerintah, dan

Permenkominfo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

PM 36 tahun 2014 dirancang untuk Memberikan Pedoman bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melakukan pendaftaran Sistem Elektronik. Ruang lingkup dari pm ini mencakup tentang Penentuan lingkup jenis Sistem Elektronik yang wajib didaftarkan.

Dasar pengaturannya berasal dari Pengaturan Informasi dan Transaksi Elektronik : yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

meningkatkan tata kelola data strategis yang baik. Naskah awal RPP Perlindungan Data Elektronik Strategis telah disusun pada tahun 2010 dan dilanjutkan dengan pembahasan pada tahun 2011 namun **tidak dibahas pada tahun 2012**. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemotongan anggaran sehingga pembahasan RPP PDES ini ditiadakan.

Tahun 2013 Dalam rangka menyusun naskah RPP PDES, telah dilaksanakan FGD di Jakarta dan Bandung. Gambaran umum tentang pengaturan atas peran pemerintah dan identifikasi data elektronik yang bersifat strategis seperti data-data tentang pertahanan dan keamanan, perbankan, dan data elektronik strategis lainnya yang perlu dilindungi dalam rangka perwujudan amanat Pasal 40 UU ITE.

Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 5 Ayat 5.

Proses permohonan pendaftaran, pengesahan, dan seluruh proses administrasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 pm ini, dilaksanakan secara online melalui jaringan internet. Pengajuan permohonan pendaftarannya sendiri cukup mudah, hanya meliputi: Pengisian form pendaftaran; dan Penyertaan kelengkapan dokumen pendaftaran.

2. Pusat Komunitas Kreatif

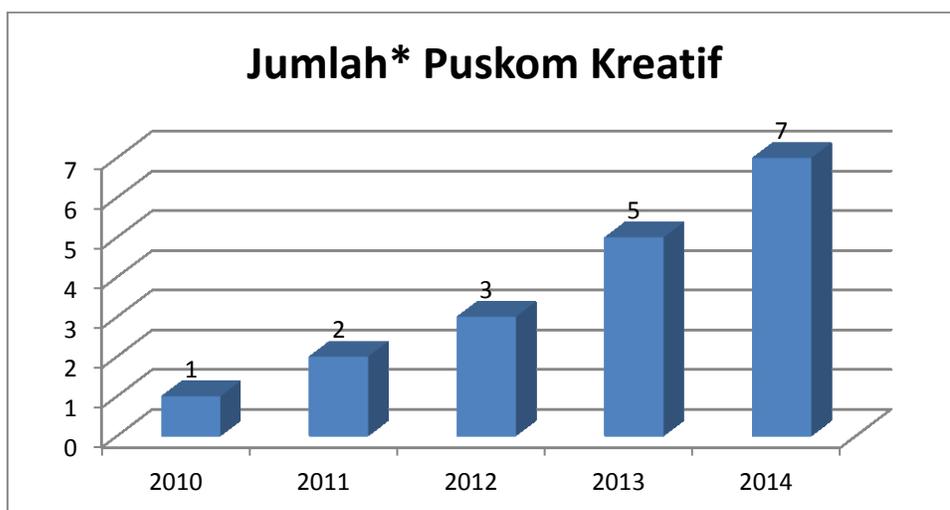
Pusat Komunitas Kreatif adalah sebuah bangunan yang difasilitasi media berbasis Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kreatifitas dan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga dapat membantu transformasi dari manual bisnis menjadi elektronik bisnis. Ke depannya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta taraf hidup masyarakat setempat.

Pembangunan Pusat Komunitas Kreatif adalah kerjasama antara Kementerian Kominfo dan

Pemerintah Daerah, dimana Kementerian Kominfo menyediakan peralatan TIK di Pusat Komunitas Kreatif dan penunjangnya sedangkan Pemerintah Daerah menyiapkan bangunan, tenaga pengelola harian, serta biaya operasional (internet akses, listrik, SDM, dll).

Tahun 2014 Pembangunan Puskomkreatif di Kutai Kartanegara dan Temanggung. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010 dengan lokasi sebagai berikut :

Tahun	Lokasi
2010	Lombok Utara, NTB
2011	Lamongan, Jawa Timur
2012	Palangkaraya, Kalimantan Tengah
2013	Payakumbuh, Sulawesi Barat dan Pare-Pare, Sulawesi Selatan
2014	Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Temanggung, Jawa Tengah



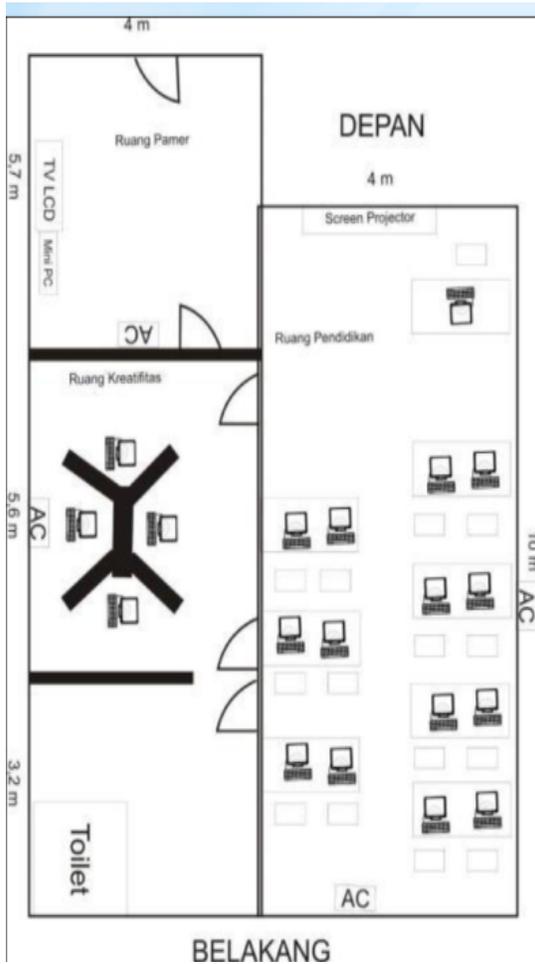
*kumulatif



Puskom Kreatif Kutai Kartanegara, 2014



Puskom Kreatif Temanggung, 2014



PERALATAN MULTIMEDIA	
Ruang Pendidikan	17 unit PC Client 1 unit Server 1 unit UPS 1 unit Projector 1 unit Electric Screen Projector 1 unit Printer
Ruang Kreativitas	4 unit PC Client 1 unit Printer
Ruang Pamer	1 unit TV LCD 1 unit Mini PC
Peralatan pendukung lainnya	Kamera / Handy cam Software Design Air Conditioner

Peralatan Puskom Kreatif

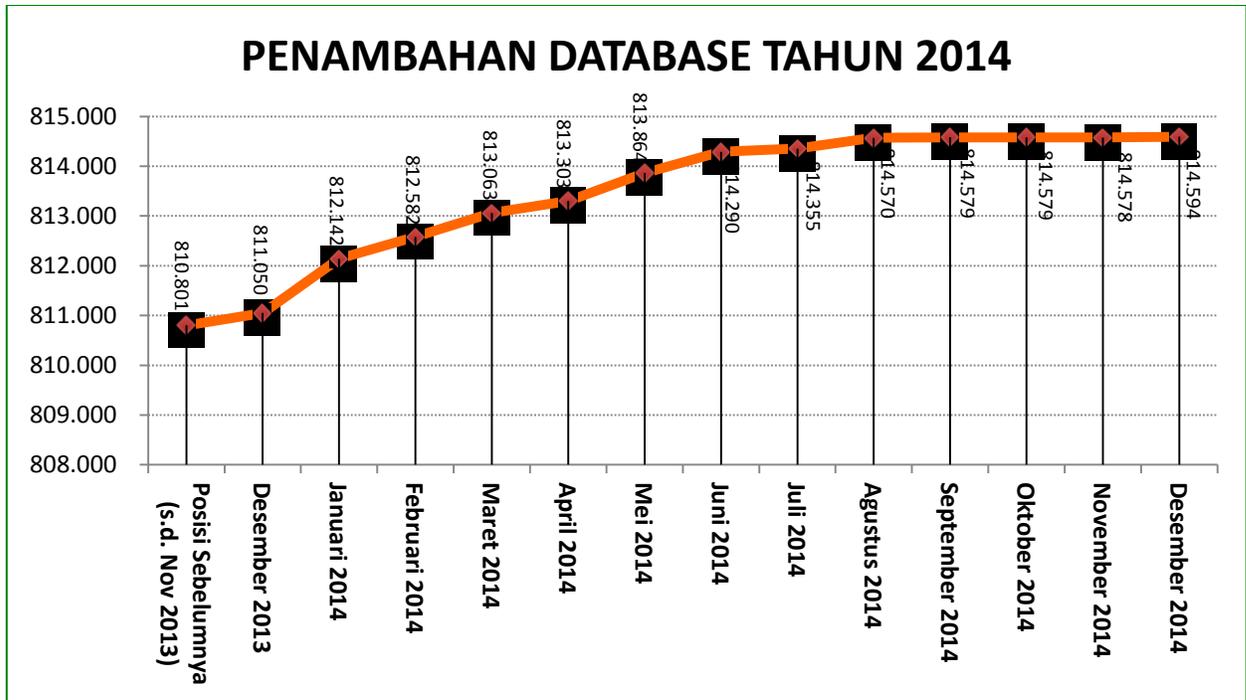
3. Trust+ Positif

Telah dikembangkan model penyaringan konten internet yang bermuatan negatif dalam rangka menuju internet sehat dan aman. Model ini disebut TRUST+Positif menjadi acuan bagi seluruh Internet Service Provider (ISP). Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah :

- Disahkannya Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan negatif;
- Pengembangan filtering;
- Memfasilitasi untuk membuat referensi bersama secara nasional;
- Melakukan updating secara terus menerus;
- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan ISP-ISP untuk proses updating dari sisi ISP;
- Melakukan survey lapangan terhadap warnet-warnet secara sampling di beberapa kota.

JUMLAH PENGADUAN DAN PENAMBAHAN/PENGURANGAN DATA S/D DESEMBER 2014

BULAN	Jumlah Pengaduan yang diterima	Penambahan situs di-blokir	Pengurangan situs dari blokir (normalisasi)	Total Situs dalam Daftar Trust+positif
Desember 2013	496	249	-	811.050
Januari 2014	301	1.096	4	812.142
Februari 2014	249	446	6	812.582
Maret 2014	445	485	4	813.063
April 2014	175	247	7	813.303
Mei 2014	231	561	-	813.864
Juni 2014	135	427	1	814.290
Juli 2014	195	69	4	814.355
Agustus 2014	195	215	-	814.570
September 2014	167	19	10	814.579
Oktober 2014	176	-	-	814.579
November 2014	255	-	1	814.578
Desember 2014	166	24	8	814.594



4. Indonesia ICT Award (INAICTA)

INAICTA merupakan ajang tahunan lomba karya cipta kreatifitas dan inovasi di bidang TIK yang terbesar di Indonesia. *INAICTA* diselenggarakan untuk mendorong berkembangnya karya dan produk TIK lokal dibarengi dengan peningkatan kualitasnya. Peserta *INAICTA* tidak hanya pengembang perorangan tapi juga bagi perusahaan lokal. Tujuan akhir diselenggarakannya *INAICTA* adalah agar para pengembang dan perusahaan lokal

tersebut dapat tumbuh, kualitasnya semakin baik sehingga mendapatkan kesempatan yang layak dari industri, investor dan pasar serta bermanfaat bagi masyarakat yang akhirnya dapat menjadi penopang daya saing ekonomi nasional. *INAICTA* dibagi dalam dua kategori utama yaitu profesional dan student dimana setiap tahun melombakan kategori yang berbeda.



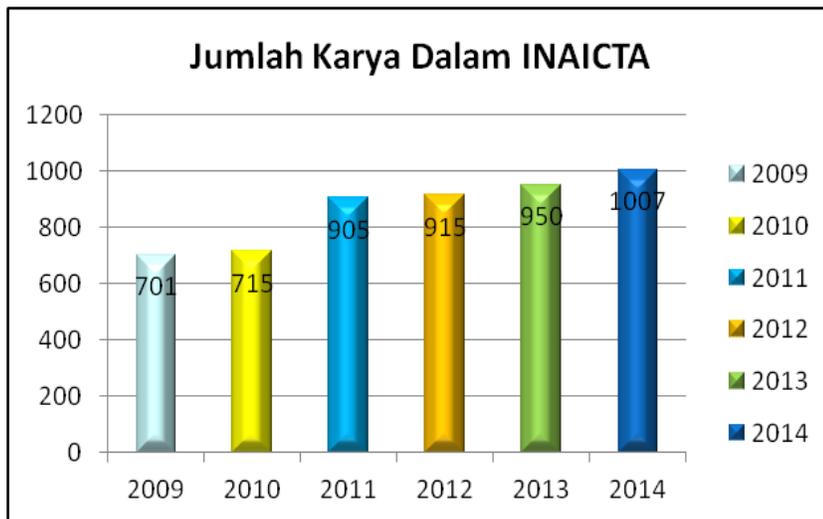
Menkominfo bersama dengan para pemenang INAICTA 2014



Penyerahan Penghargaan pada Pemenang INAICTA 2014

Tahun 2014 dilaksanakan INAICTA dengan tema “Innovate, Integrate, Empower”, terdapat 1007 karya (target 700 karya) yang

masuk di INAICTA 2014 yang terbagi kedalam 15 kategori.



5. Asia Pacific Information and Communication Technology Awards (APICTA)

APICTA merupakan ajang lomba kreatifitas dan inovasi piranti lunak tahunan yang diikuti oleh perorangan atau perusahaan bidang TIK di kawasan Asia Pasifik. Para pemenang INAICTA akan diikutsertakan dalam ajang ini. Pada Tahun 2014, APICTA diadakan di Jakarta,

Indonesia. APICTA ke-14 ini diikuti oleh 17 negara, dengan total 183 karya dari 17 kategori yang dikompertisikan. Indonesia meraih 8 Merit Award. Target jumlah karya delegasi Indonesia pada ajang APICTA 2014 ini adalah 10 karya ternyata terealisasi sebanyak 26 karya.



Menkominfo, Dirjen Aptika, Direktur PI dan para undangan pada acara APICTA 2014



Delegasi Indonesia pada APICTA 2014



Delegasi Indonesia dalam ajang APICITA bersama dengan Menkominfo dan Dirjen Aptika

Prestasi Indonesia pada APICITA Tahun 2009 -2014

Tahun	Lokasi	Prestasi Indonesia
2009	Melbourne, Australia	4 Merit
2010	Kuala Lumpur, Malaysia	✓ Indonesia memecahkan rekor dalam sejarah 10 tahun penyelenggaraan APICITA dengan mengirimkan peserta termuda ✓ 1 Winner
2011	Pattaya Thailand	1 Winner, 3 Merit
2012	Brunei Darussalam	2 Winner dan 5 Merit
2013	Hongkong	1 Winner dan 4 Merit
2014	Jakarta	8 Merit

6. Kartini Next Generation Award (KNG Award)

KNG Award diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kartini dan merupakan penghargaan tahunan yang diselenggarakan sejak tahun 2012. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada perempuan yang berprofesi sebagai wirausaha dan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mengembangkan usahanya, dan menginspirasi perempuan lain untuk memanfaatkan TIK dalam kehidupannya. Di tahun 2012 diputuskan peraih KNG Award adalah perempuan pengusaha yang menerima *Apresiasi Digital Entrepreneur Product* yaitu Ibu

Selvi Nurlia (Kek Pisang Villa – Batam) dan perempuan pengusaha yang menerima *Apresiasi Digital Entrepreneur Service* yaitu Ibu Suryani Aris (duniabermain.com).

KNG tahun 2013 diselenggarakan dengan tema “*inspiring woman in ICT*” yang mengedepankan wanita yang mempunyai talenta dan memberikan inspirasi pada lingkungan sekitar melalui TIK. Peraih KNG Award tahun 2013 adalah: Septi Peni Wulandani, penerima *Inspiring Woman in ICT for Education Award*; Stefanie Kurniadi, penerima *Inspiring Woman in ICT for Entrepreneur Award*; Adiska Fardani, penerima

Inspiring Woman in ICT for Creative Media Award; Nila Tanzil, penerima Inspiring Woman in ICT for Community Development Award; Angkie Yudistia, penerima Special Award for

Inspiring Woman in ICT; Aulia Halimatussadiyah, penerima Special Award for Inspiring Woman in ICT.



Kartini Next Generation Award 2014

Sedangkan untuk **Tahun 2014**, KNG bertepatan “Agent of Change” dengan memilih wanita yang dapat melakukan perubahan pada lingkungannya dengan TIK. Peraih KNG Award tahun 2014 adalah: Nancy Margried, penerima *Woman as Agent of Change in Business*; Mira Julia Putri,

penerima *Woman as Agent of Change in Education*; Wilda Yanti, penerima *Woman as Agent of Change in Health and Environment*; Intan Anggita Pritiwie, penerima *Woman as Agent of Change in Art and Culture*; Grace Melia Kristanto penerima *Special Award for Woman as Agent of Change*.

7. Sosialisasi Internet Cerdas, Kreatif, dan Produktif (Internet CAKAP)

Sosialisasi Internet CAKAP merupakan kelanjutan dari program Internet Sehat dan Aman (INSAN), yaitu sebuah program yang bertujuan memberi pemahaman yang cukup tentang penggunaan internet secara bijak, mengetahui bahaya internet dan antisipasinya, serta menumbuhkan semangat berinternet secara sehat dan aman. Setelah 2 tahun program tersebut berjalan, Direktorat Pemberdayaan Informatika mulai tahun 2014 melakukan transformasi program menjadi penggunaan internet secara cerdas, kreatif, dan produktif dimana sebelumnya ditekankan pendekatan *infrastructure protective* berubah menjadi *self protective*. Jika dahulu pemerintah selalu melakukan pemblokiran konten negatif dengan berbagai macam filter untuk

melindungi masyarakat dari konten negatif (*infrastructure protective*), kini masyarakat harus dapat lebih mandiri dalam memilih konten yang bermanfaat bagi dirinya (*self protective*). Masyarakat diharapkan cerdas memilih konten yang bermanfaat bagi dirinya sehingga menjadi lebih kreatif dan produktif. Pada tahun 2014, Direktorat Pemberdayaan Informatika telah melaksanakan Sosialisasi Internet CAKAP di 18 lokasi dan mendukung pelaksanaan Sosialisasi Internet CAKAP yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sekolah dan komunitas di 12 lokasi di Indonesia dengan total peserta 5.335 orang.



Tanya jawab peserta dengan narasumber pada acara sosialisasi INCAKAP di Magelang 2014

8. Bimbingan Teknis Pemberdayaan Informatika

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Informatika, Direktorat Pemberdayaan Informatika membawa misi untuk meningkatkan kontribusi para pelaku TIK dalam meningkatkan perekonomian nasional, dengan menghasilkan produk dan jasa yang mampu menggerakkan roda perekonomian untuk berbagai kalangan di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari kegiatan Bimbingan Teknis adalah sebagai berikut:

1. Memotivasi generasi muda, pelaku usaha, dan penyandang disabilitas untuk maju dan menggunakan TIK.
2. Meningkatkan pemanfaatan TIK bagi pemuda, pelaku usaha, dan penyandang disabilitas.
3. Mengupayakan peningkatan penetrasi internet di Indonesia dan pelanggan rumahan (keluarga) dan dari komunitas pendidikan secara aman dan bertanggung jawab.

Pada tahun 2014, Direktorat Pemberdayaan Informatika telah melaksanakan Bimbingan Teknis untuk guru, pelaku usaha, dan penyandang disabilitas di 11 lokasi dengan total peserta 1.300 peserta di seluruh Indonesia.



Bimbingan Teknis untuk kaum difabel di Solo, November 2014

9. Festival TIK

Direktorat Pemberdayaan Informatika bekerja sama dengan Relawan TIK Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Pemerintah Kota Manado mengadakan Festival TIK untuk Rakyat 2014 pada tanggal 3-4 Juni 2014 di Manado. Festival TIK untuk Rakyat 2014 ini memiliki tema “Si Tou Timou Tumou Tou deng TIK” atau “Manusia Hidup untuk Memanusiakan Manusia Lain dengan TIK”. Tujuan dari Festival TIK untuk Rakyat 2014 adalah membangun kerjasama yang konstruktif dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat akan perlunya penerapan dan pemanfaatan TIK dengan para stakeholder, baik dari Pemerintah, perguruan

tinggi, penggiat TIK, komunitas, dan pelaku usaha yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan TIK di Indonesia. Festival TIK untuk Rakyat 2014 terdiri dari seminar, workshop, dan pameran yang meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemanfaatan TIK. Narasumber dari berbagai lembaga hadir untuk mengisi acara, seperti DNS Nawala, Mozilla Indonesia, Kaskus, IBM, Jalin Merapi, Universitas Sam Ratulangi, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Foto Bersama Dirjen Aplikasi Informatika, Staf Ahli Menteri Bidang Sosekbud, Direktur Pemberdayaan Informatika, Pemkot Manado, dan Relawan TIK Indonesia dalam acara Festival TIK untuk Rakyat 2014

10. Festival Desa TIK

Festival Destika bertujuan untuk memberikan motivasi pada desa-desa yang mulai menggunakan TIK sebagai salah satu bentuk pelayanan dan transparansi pembangunan desa. Festival Destika menjadi wadah bagi desa-desa untuk mempromosikan potensi lokal sekaligus menggali ide serta bertukar informasi mengenai inovasi pemanfaatan TIK dari desa lainnya. Pada tahun 2014, Festival Destika kembali dilaksanakan di Desa Tanjungsari bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka tanggal 26-27 September 2014 di lapangan Balai Desa Tanjungsari. Hadir dalam kegiatan tersebut 500 orang peserta yang terdiri dari

perwakilan desa se-Kabupaten Majalengka, perwakilan desa se-Indonesia, perwakilan Relawan TIK Indonesia, komunitas-komunitas TIK seperti : PANDI dan Nawala, serta warga sekitar. Festival Destika kali ini mengedepankan pemanfaatan TIK di setiap desa dengan sistem informasi yang dirancang oleh tim Relawan TIK Indonesia bekerjasama dengan Gerakan Desa Membangun (GDM) dan kemudian disebarluaskan bekerjasama dengan berbagai Komunitas TIK di seluruh Indonesia. Kegiatan Festival Destika terdiri dari seminar, workshop, pameran, serta penguatan Relawan TIK Majalengka.



Seminar dan Workshop dalam Festival Desa TIK

II. Administrasi perkantoran MAYA (siMAYA)

Sistem administrasi perkantoran MAYA (siMAYA) telah dikembangkan sejak tahun 2012 dan diperkuat dari sisi kebijakan oleh SE Menpan No. 5 Tahun 2013 tentang aplikasi tata naskah dinas elektronik pada instansi pemerintah. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran dari Menpan pengguna siMAYA dari Pemerintah Daerah dan Kementerian atau Lembaga meningkat. Peningkatan pengguna siMAYA dibarengi dengan perbaikan fitur dan proses bisnis di siMAYA sendiri, hingga kini siMAYA telah memasuki versi 4.0.

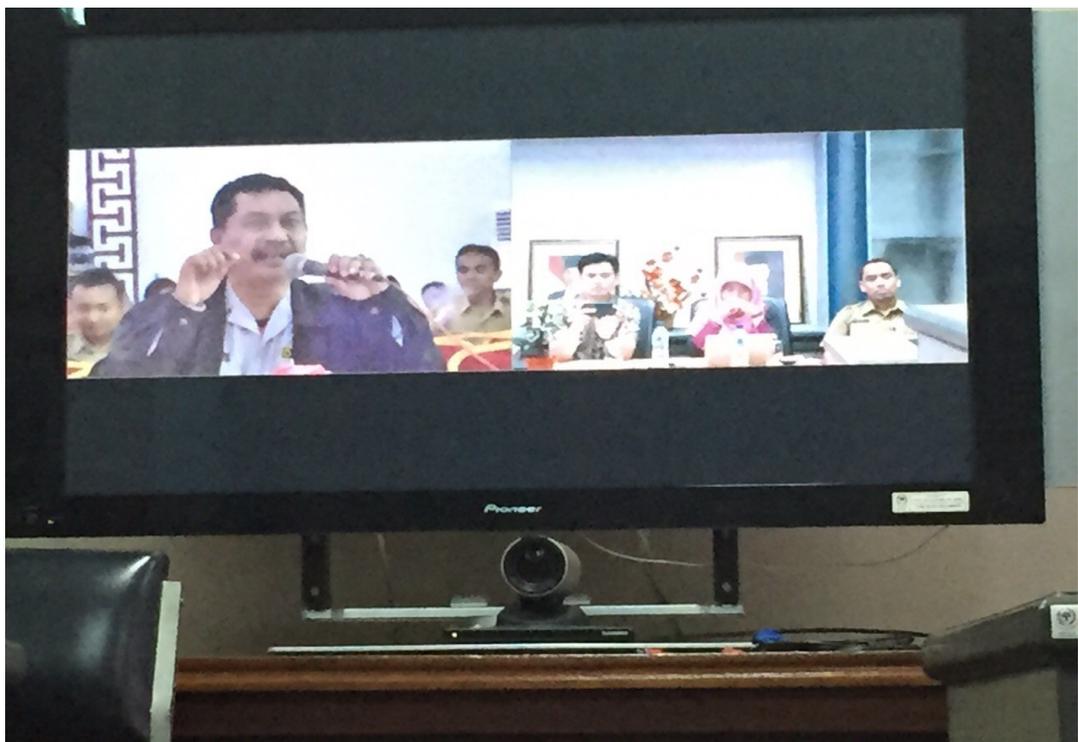
Sosialisasi siMAYA telah dilakukan secara intensif dan terus menerus baik melalui tatap muka langsung ataupun online. siMAYA telah digunakan oleh 143 instansi yang terdiri dari : 15 Kementerian, 12 Provinsi, 24 Kota, 84

Kabupaten, dan 8 Lembaga/Komisi. Adapun sepuluh instansi pengguna paling aktif, yaitu: Kota Tegal, Kab Nunukan, Prov Jawa Tengah, Kab Bandung, Prov Gorontalo, Kementerian Lingkungan Hidup, Kota Probolinggo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Jepara, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk menyelesaikan pengaduan yang sifatnya teknis dapat menghubungi helpdesk baik offline maupun online. Layanan helpdesk online : helpdesk.layanan.go.id. Grup pengguna siMAYA di seluruh Indonesia juga telah dibuat dengan memanfaatkan jejaring sosial facebook dengan alamat <https://www.facebook.com/groups/simaya.id/>.



Bimtek siMAYA di Kabupaten Nunukan, 2014



Teleconference sosialisasi siMAYA ke Kab. Talaud di Kementerian Dalam Negeri

12. GSB-MANTRA (Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data)

Ditjen Aplikasi Informatika melalui Direktorat e-Government, sejak tahun 2011 telah menyediakan aplikasi untuk Berbagi Pakai Data antar Sistem Elektronik dengan nama MANTRA singkatan dari Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data berbasis teknologi Government Service Bus. Aplikasi GSB-MANTRA merupakan orkestra layanan berbagi pakai data/informasi yang menerapkan metode interoperabilitas antar sistem elektronik sesuai amanat Inpres nomor 3 tahun 2003 dan dilandasi oleh Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 pasal 23. Pada tahun 2014 aplikasi MANTRA telah digunakan sebagai GSB untuk berbagi pakai data wajib pajak (dalam rangka memfasilitasi PMK No. 95/PMK.03/2013 dan

No.132/PMK.03/2013) antara Sistem Elektronik Ditjen. Pajak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PDSI Kemkominfo dan DPKD Prov. Sumatera Barat. Selama tahun 2014 pemanfaatan aplikasi MANTRA telah disosialisasikan dan dipasang melalui bimbingan teknis maupun pendampingan teknis di 9 (sembilan) instansi pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Implementasi aplikasi MANTRA dapat difungsikan sebagai *Application Programming Interface (API)* *Webservice* dan GSB, dimana infrastruktur pengamanan jaringannya menggunakan PNS-Box. Adapun instansi-instansi yang mengimplementasikan GSB dan PNS Box dari tahun 2012 adalah :

Tahun 2012 (19 Instansi)	Tahun 2013 (9 Instansi)	Tahun 2014 (9 Instansi)
<ul style="list-style-type: none"> - Ditjen Pajak - SePP Kemenkominfo - Kemenpolhukam - Kementerian Kelautan dan Perikanan - Diskominfo Provinsi Jabar - Dishubkominfo Kab. Demak - Diskominfo Lamongan - Dishubkominfo Kab. Kudus - Dishubkominfo Kab. Surakarta - Diskominfo Provinsi Jawa Timur - Diskominfo Kota Malang - Dishubkominfo Kab. Banyuasin, Sumsel - Diskominfo Kab. Padang Priaman - BNP2TKI - Kemenkes - Kemenlu - DPKAD Provinsi Sumbar - LKPP - Dishubkominfo Kab. Banyuwangi 	<ul style="list-style-type: none"> - BKN - Kemenlu - Kota Cimahi - Kota Pekalongan - Kab. Belitung - Kab. Sleman - Kab. Kulon Progo - Pemprov DIY - Kota Pekanbaru 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemsetneg - Pemkot Pekalongan - Pemkot Bontang - Pemkab Cirebon - Pemkot Padang Panjang - Pemprov Lampung - Pemprov Gorontalo - Pemkab Rokan Hulu - Pemkab Maros

13. Pusat Penitipan Data (PUSPITA)

PUSPITA adalah layanan penitipan data yang dikelola Direktorat e-Government yang diperuntukan bagi instansi pemerintah, terutama instansi yang kekurangan anggaran atau yang tidak memiliki Data center sendiri. Puspita berfungsi sebagai sarana penitipan data (free Hosting) dengan space yang didapat maksimal 5 GB untuk kabupaten atau kota. Sementara 10 GB untuk Provinsi atau Kementerian. Proses untuk dapat menggunakan PUSPITA yaitu pemohon mengajukan surat yang ditujukan ke Direktur e-Government, Kemkominfo. Pemohon akan mendapatkan akun user name dan password untuk mengakses storage melalui layanan Cpanel. Fasilitas Utama PUSPITA adalah :

- Kapasitas 5 Gigabyte secara keseluruhan per akun;
- Berbasis Cpanel;
- Komposisi Pelayanan DNS, Web+Database, dan Email untuk tiap akun;

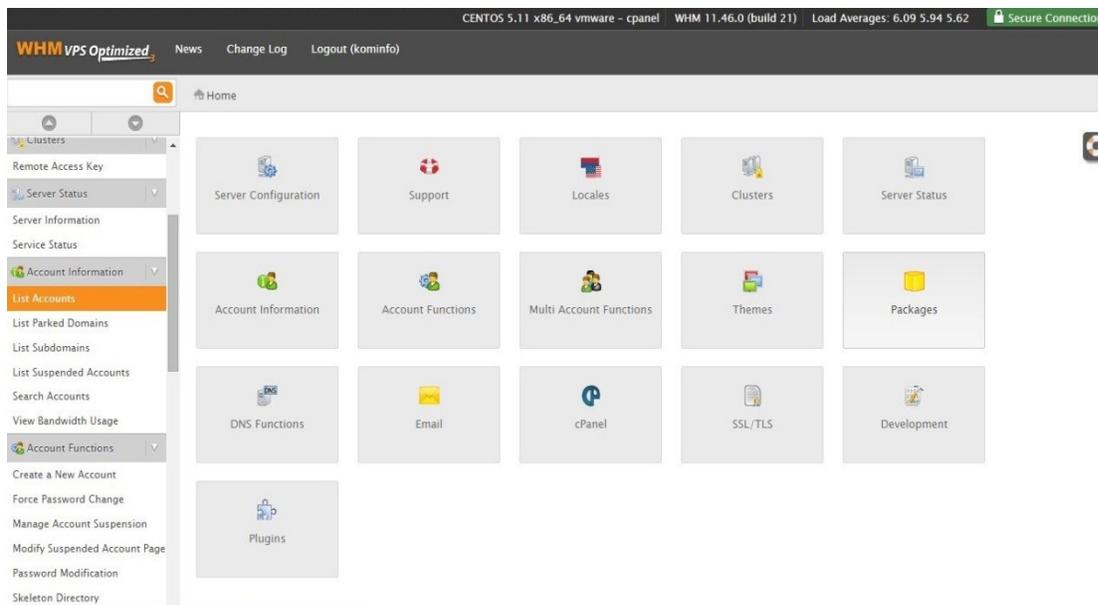
- Kapasitas subdomain yang tidak terbatas;
- Akun email yang tidak terbatas;
- Pencatatan dan Statistik situs di-hosting;
- Pencatatan dan Statistik terhadap status/keadaan akun;
- Online backup/restore.

Speksifikasi Perangkat Pelayanan :

- VPS Host Server (per 1 server);
- CPU: 8 Core Intel Xeon E5520 x 2 @ 2.266 GHz;
- Memory: 48 Gigabyte;
- Hard Drive: 1.36 TB embedded drive, 8 TB storage drive;
- Host OS: VMWare ESXi 4/5;
- Colocation Rack (per 1 rack);
- 42U Rack server;
- 24 Patch cord unit per rack;
- Gigabit manageable switch;
- Cat-6 cable system.

Instansi Yang Hosting di Data Center Direktorat e-Government

1	Provinsi Papua	18	Kabupaten Lombok Timur
2	Provinsi Papua Barat	19	Kota Malang
3	Provinsi Nusa Tenggara Barat	20	Kabupaten Maros
4	Provinsi Jambi	21	Kabupaten Padang Pariaman
5	Provinsi Kalimantan Selatan	22	Kabupaten Siak
6	Kabupaten Bangli	23	Kabupaten Sidoarjo
7	Kabupaten Belitung	24	Kabupaten Pasaman
8	Kota Bitung	25	Kota Mataram
9	Kabupaten Dairi	26	Kabupaten trenggalek
10	Kabupaten Demak	27	Kabupaten Talaud
11	DPRD Kota Bitung	28	Kota Tomohon
12	Kota Dumai	29	Kabupaten Sukoharjo
13	Kabupaten Gorontalo Utara	30	Kabupaten Rotendao
14	Kabupaten Indragiri Hilir	31	Kota Malang
15	Kabupaten Kudus	32	Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
16	Kabupaten Kuningan	33	UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat)
17	Kabupaten Lahat		



Tampilan Cpanel

14. Pelayanan Nama Domain K/L

Saat ini regulasi mengenai pengelolaan nama domain di Indonesia diatur dengan Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2013. Dalam Permen tersebut diatur empat klasifikasi nama domain yakni : nama domain tingkat generik, nama domain tingkat tinggi, nama domain tingkat kedua dan nama domain tingkat turunan. Pengelolaan nama domain tingkat tinggi (registri) dikelola oleh PANDI berdasarkan SK Menkominfo Nomor 806 Tahun 2014.

Khusus untuk instansi pemerintah (K/L), dasar hukum penyelenggaraan yakni Permen Kominfo No 28 Tahun 2006 yang pada tahun 2014 telah dilakukan penyempurnaan dan sekaligus memenuhi amanat PP PSTE yang akan dituangkan dalam RPM tentang Registrar Nama Domain Instansi

Penyelenggara Negara. Terdapat hal-hal penting yang diatur, diantaranya :

1. Adanya aturan mengenai penonaktifan nama domain Instansi Penyelenggara Negara.
2. Klasifikasi penggunaan nama domain Instansi Penyelenggara Negara antara lain : alamat elektronik resmi Instansi, layanan publik dan kegiatan berskala nasional.
3. Server Nama Domain dan Alamat IP wajib di wilayah hukum NKRI.

Pelayanan Nama Domain K/L merupakan salah satu dari tiga Quickwins Kementerian Kominfo. Berdasarkan pemetaan hasil tahun 2014 telah mencapai target yakni waktu persetujuan layanan 4 hari dengan SLA 90% sesuai dengan ISO 2008:9001. Capaian kinerja untuk nama domain tahun 2014 sebesar 100% dengan data sebagai berikut :

Tabel Approval Nama Domain K/L Tahun 2014

Bulan	Pemohon	Approval	Reject	tertunda
Jan	72	28	44	0
Feb	26	12	14	0
Mar	70	32	38	0
Apr	44	28	16	0
Mei	23	8	15	0
Jun	32	13	19	2
Jul	24	11	13	0
Agt	25	13	12	0
Sept	9	3	6	0
Okt	12	5	7	0
Nop	18	12	6	0
Des	25	10	15	0

Metode perhitungan SLA dalam layanan 24 jam dan 5 hari kerja yakni : (Jumlah pemohon - jumlah tertunda) / jumlah pemohon x 100%. Aplikasi registrar nama domain.go.id telah

selesai dikembangkan dan telah diimplementasikan dengan alamat situs www.domain.go.id sehingga pelayanan dapat diselenggarakan secara offline dan online.

15. Indonesia Game Rating System

Game yang beredar di Indonesia selama ini belum memiliki sistem rating, sehingga banyak pengguna Game yang menggunakan Game tidak sesuai dengan tingkatan umurnya. Hal ini tentu perlu dicegah agar penggunaan Game sesuai dengan peruntukan Game tersebut.

Karena itu, sistem rating game tidak kalah pentingnya dibandingkan konten dari game itu sendiri. Dengan menggunakan sistem rating, kita bisa mengetahui untuk pasar umur berapa game tersebut ditujukan. Sehingga, orang tua dapat memilihkan game yang tepat untuk anak-anaknya sesuai dengan umur.

Terdapat beberapa sistem rating di dunia, mulai dari ESRB (Amerika Serikat), CERO (Jepang) dan PEGI (Eropa) yang menjadi patokan dalam menentukan target pengguna game yang masuk ke Indonesia selama ini. Kelemahannya, sistem rating tersebut kerap

tidak sesuai dengan kultur dan budaya Indonesia.

Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum bekerja sama dengan beberapa pelaku industri game di Indonesia untuk menyusun sistem rating untuk produk game yang dipasarkan di Indonesia. Sistem rating dimaksud dapat menjadi dasar bagi para pengembang game lokal dalam membuat produk game sesuai sasaran pengguna yang dituju dan memberikan kemudahan bagi para pengguna game untuk mengenal kesesuaian produk game yang digunakan.

Keberadaan Game Rating System Indonesia, diharapkan dapat menyaring game dari luar yang masuk ke pasar Indonesia. Game Rating ini juga menjadi pedoman bagi developer dan

penerbit serta asosiasi game di Indonesia untuk menentukan target pengguna game. Selain itu, sistem rating ini juga diharapkan dapat mendorong industri game nasional karena konsumen mendapatkan kepastian informasi terkait game yang beredar di Indonesia. Penerapan Indonesia Game Rating System (IGRS) diklasifikasikan berdasarkan usia pengguna sebagai berikut:

1. Umum (Semua Umur)
2. Balita (1 - 5 tahun)
3. Anak (6 - 12 tahun)
4. Remaja (13 tahun atau lebih)
5. Dewasa (17 tahun atau lebih)
6. Terbatas (21 tahun atau lebih)

Setiap game akan diklasifikasikan kepada level usia dengan melakukan evaluasi atas konten game berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Seluruh kriteria disusun dengan mengikutsertakan para pelaku industri game, praktisi psikolog, pemerintah, dan masyarakat. Pada tahun 2014, telah

dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Rapat penyusunan tahapan penyusunan IGRS.
- Rapat perumusan defenisi IGRS dan dasar penyusunan IGRS.
- Penyusunan klasifikasi usia pengguna game.
- Penyusunan dimensi penilaian konten game.
- Penyusunan detail penilaian dan level konten game.
- Ujicoba klasifikasi usia dan dimensi penilaian konten game terhadap game.
- Komparasi hasil pengujian IGRS dengan game rating system di negara lain.
- Penyusunan draft kebijakan Surat Edaran IGRS.
- Penyusunan standar prosedur pelaksanaan IGRS.



Game Dev Gathering, 6 Desember 2014

16. Inkubator Industri Informatika

Inkubator Industri Informatika adalah tempat yang dirancang untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) industri kreatif yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tujuan akhirnya menjadikan para pelaku usaha di industri informatika menjadi perusahaan yang menghasilkan keuntungan, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang berkelanjutan hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Program inkubasi umumnya ditujukan kepada *startup company* atau suatu perusahaan yang masih berada di tahap-tahap awal memulai usaha. Pengembangan industri berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membutuhkan pembinaan yang lebih intensif. Kelompok usaha atau industri ini agak berbeda dengan bidang-bidang lain karena pada umumnya jenis industri ini didirikan oleh personel yang memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi, memerlukan jumlah modal yang besar, mempunyai kandungan teknologi tinggi, serta resiko tinggi dalam pemasarannya.

Pada tahap inkubasi, UMKM binaan (*tenant*) diberikan pendampingan penuh oleh tim konsultan yang secara intensif melakukan evaluasi dan konsultasi agar mampu menjadi teknopreneur yang tangguh dan mandiri. Lama masa inkubasi umumnya antara satu hingga tiga tahun. Adapun fasilitas yang diberikan selama masa inkubasi dikenal dengan konsep 7S:

1. *Space*: menyediakan tempat bagi *tenant* untuk mengembangkan usaha pada tahap awal;

2. *Shared*: menyediakan fasilitas kantor yang dapat digunakan secara bersama, misalnya ruang rapat, telepon, faksimili, komputer dan internet;
3. *Services*: menyediakan layanan konsultasi manajemen dan masalah pasar, aspek keuangan dan hukum, informasi perdagangan dan teknologi;
4. *Support*: membantu dukungan akses kepada riset, jaringan profesional, teknologi dan investasi;
5. *Skill development*: memberikan latihan keterampilan teknis, penyiapan rencana bisnis, manajemen, kepemimpinan, dan kemampuan lainnya;
6. *Seed Capital*: membantu akses usaha kecil kepada sumber-sumber pendanaan atau lembaga keuangan yang ada;
7. *Synergy*: mengadakan kerjasama dengan pihak terkait, seperti universitas, lembaga riset, usaha swasta, profesional, maupun dengan masyarakat lain.

Saat ini Ditjen Aplikasi Informatika telah membangun Inkubator Industri Informatika di dua provinsi, yaitu di Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perencanaan awal menetapkan penambahan 2 inkubator baru namun kebijakan pimpinan memutuskan untuk lebih memfokuskan pemberdayaan bagi *tenant* yang sudah ada agar dapat mandiri dan berprestasi. Selama tahun 2014 Inkubator Bandung melakukan pembinaan terhadap lima *tenant*, sedangkan Inkubator Yogyakarta yang bekerja sama dengan STMIK AMIKOM Yogyakarta membina 12 *tenant*. Pemberdayaan juga dengan mengembangkan produk atau aplikasi, yaitu *game*, animasi, *mobile*, *desktop*, dan *web*. Daftar *tenant* dapat dilihat di tabel berikut :

Tenant Inkubator Industri Informatika Indonesia

No.	Nama Tim	Lokasi	Tahun Mulai	Keterangan
1.	Cufid Games	Bandung	2013	
2.	Kidalang Studio	Bandung	2013	
3.	Xandbit Interactive	Bandung	2013	
4.	Shaff Studio	Bandung	2014	
5.	Sumapala Technologies	Bandung	2014	
6.	AB Mikro	Yogyakarta	2014	
7.	AMCC Corporation	Yogyakarta	2014	
8.	Amoeba System	Yogyakarta	2014	
9.	Artefact Indonesia	Yogyakarta	2014	
10.	Second Vision	Yogyakarta	2014	
11.	Tactoo, Inc	Yogyakarta	2014	
12.	Veo Creative	Yogyakarta	2014	
13.	War Tech	Yogyakarta	2014	
14.	Dega Labs	Yogyakarta	2014	Out-wall
15.	Golek Wayang	Yogyakarta	2014	Out-wall
16.	V3 Team	Yogyakarta	2014	Out-wall
17.	WAF Corporation	Yogyakarta	2014	Out-wall



Kidalang dengan produk "Sage Fusion 2" berhasil memenangkan Tizen App Challenge

Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2014 yaitu pendampingan *tenant* Inkubator Bandung dan Inkubator Yogyakarta, dengan rincian berikut : seleksi *tenant* untuk Inkubator Bandung pada Juni 2014; *Workshop* Inkubator Informatika di Festival TIK Manado pada Juni 2014; seminar Inkubator Industri

Informatika dan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan STMIK AMIKOM Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Operasional Inkubator Industri Informatika pada Agustus 2014; dan evaluasi akhir *tenant* Inkubator Bandung dan Yogyakarta pada November 2014. Prestasi *tenant* selama masa

inkubasi 2014 yaitu : Kidalang dengan produk “Sage Fusion 2” berhasil memenangkan *Tizen App Challenge* di acara *Mobile World Congress 2014 Barcelona*, Spanyol dan mendapatkan hadiah senilai USD \$250.000 atau Rp 2,75 milyar dengan kurs Rp 11.000 per dolar.

Perkembangan *tenant* setelah melewati masa inkubasi tahun 2014 yaitu :

- Kidalang Studio dinyatakan lulus karena telah mampu menjadi perusahaan yang mandiri. Meskipun pendapatan belum signifikan tetapi perusahaan sudah menemukan bidang yang menjadi fokus bisnisnya. Hal yang perlu terus ditingkatkan adalah aktivitas pemasaran.
- Cufid Games Studio dinyatakan lulus karena telah mampu menjadi perusahaan yang mandiri. Cufid telah memperoleh pendapatan yang cukup signifikan. Tim Cufid juga sudah menemukan bidang yang akan digeluti yaitu konten dan games edukasi.
- Sumapala Technologies masih memerlukan pendampingan lebih lanjut. Pendapatan sudah cukup lumayan walaupun diperoleh dari pengerjaan proyek dan bukan dari penjualan produk. Sumapala sudah mulai fokus yaitu *embedded system* dan *telemetry*.
- Shaff Studio masih memerlukan pendampingan lebih lanjut. Tim Shaff Studio masih berupaya untuk fokus pada produknya yaitu *3D game online*. Pembiayaan pengembangan produk dengan memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari pengerjaan proyek dan menggalang

dana melalui situs *crowdfunding* atau kerjasama dengan *publisher*.

- Alfatindo dinyatakan lulus karena telah mampu menjadi perusahaan yang mandiri. Meskipun secara pendapatan belum besar, tapi Alfatindo telah berhasil menemukan fokus produk di bidang ERP dan pengembangan modul dari proyek.
- CreateAPK dinyatakan lulus karena telah mampu menjadi perusahaan yang mandiri. Pendapatan yang didapat sudah memadai untuk operasional dan pengembangan perusahaan. Hal yang perlu ditingkatkan adalah pengembangan tim yang solid.
- Xandbit dianggap mengundurkan diri sebagai *tenant* karena sudah aktif menjalani program inkubasi di Bandung Digital Valley (BDV) Telkom.
- Veo Creative, V3, Wartech, Tactoo, dan KampusPintar dinyatakan layak dan berlanjut sebagai *tenant* untuk masa inkubasi 2015.

Secara umum, keberadaan Inkubator Industri Informatika akan memberikan berbagai manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan dan kelangsungan ekonomi setempat. Secara khusus, inkubator dapat memberikan berbagai keuntungan, seperti : menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang mendorong meningkatnya pajak pendapatan; meningkatkan citra daerah, baik dari sisi pemerintahan, sosial budaya dan teknologi; menumbuhkan kesadaran akan pentingnya wirausaha, terutama di bidang informatika; dan memperluas area bisnis, dengan munculnya berbagai perusahaan *startup*.



Pelatihan teknopreneur Kewirausahaan dan Model Bisnis , 2014



Penandatanganan MoU Ditjen Aptika dengan STIMIK AMIKOM Yogyakarta

17. Pengembangan *Embedded System*

Perangkat tertanam (*embedded device*), merupakan suatu kesatuan antara perangkat keras dan perangkat lunak yang memiliki kemampuan komputasi. Kemampuan komputasi yang dilakukan pada perangkat mobile bukan komputasi biasa (umum), tidak seluruhnya persis sama dengan komputasi pada perangkat komputer personal ataupun server.

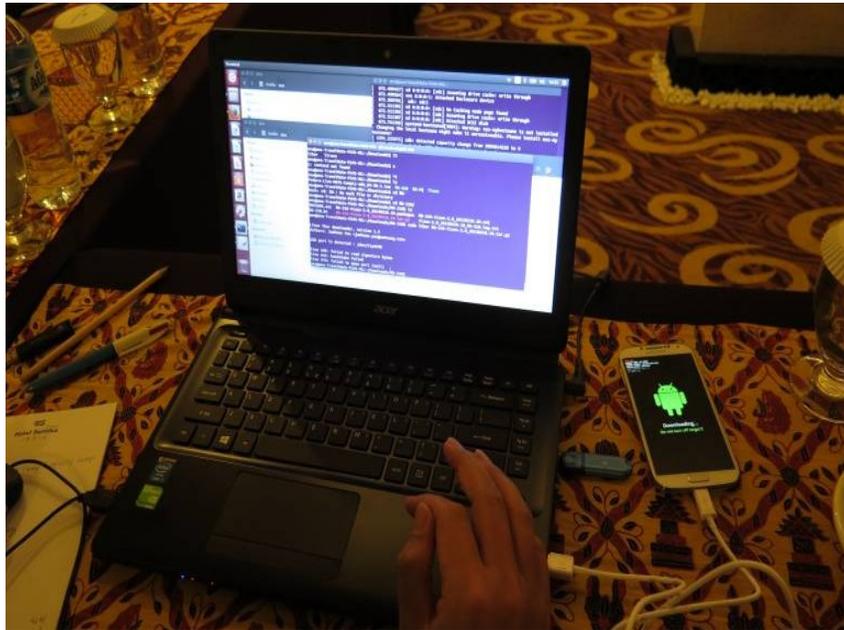
Embedded device memiliki karakteristik umum yaitu: (a) memiliki mesin pemroses (micro processor); (b) didesain untuk aplikasi khusus; (c) menggunakan antar muka pengguna yang sederhana; (d) memiliki sumber daya yang terbatas, misalnya kapasitas memory kecil dan tidak memiliki hard drive; (e) terkadang menggunakan daya listrik yang bersumber dari battery; (f) tidak diperuntukkan bagi penggunaan komputasi umum; (g) perangkat lunak didesain khusus untuk perangkat tertentu saja, sehingga tidak secara bebas dapat menambahkan aplikasi; dan (h) banyak dimanfaatkan untuk aplikasi yang tidak memerlukan interferensi (campuran) manusia

Direktorat PII memfasilitasi pengembangan sebuah *embedded system* berbasis linux bagi perangkat mobile yang memiliki peruntukan spesifik bekerjasama dengan LIPI dan BPPT, dalam hal ini dikembangkan untuk penggunaan terbatas di instansi pemerintah untuk mengimplementasikan teknologi informasi yang telah dikembangkan. *Embedded system* yang dikembangkan diberi nama GuritaOS dalam rangka mendukung terciptanya sebuah *brand image* yang menggambarkan sebuah gerakan untuk merangkai industri TIK anak bangsa.

Embedded system sendiri adalah suatu sistem komputer yang didesain untuk menangani pekerjaan/ tujuan spesifik. Secara garis besar mirip dengan Operating System yang ada pada PC. *Embedded system* yang terdapat dalam suatu perangkat juga mengatur perilaku/fungsi dari hardware tersebut.

Disain dan kemampuan untuk sistem operasi pada perangkat mobile ini sangat berbeda dengan sistem operasi untuk komputer desktop. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam disain tersebut antara lain:

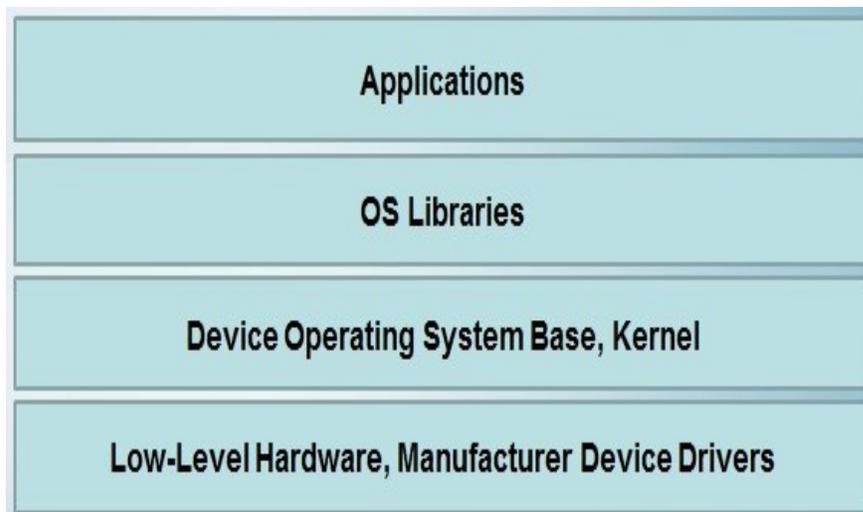
1. Perangkat mobile memiliki keterbatasan pada sumber daya perangkat (resources) yang dimiliki, seperti memori, ukuran layar, kemampuan pemrosesan dan lain sebagainya.
2. Kemampuan penyimpanan listrik (baterai) yang terbatas.
3. Keterbatasan dalam kemampuan komputing dan komunikasi.



Pembahasan Conceptual Design Architecture Proses Flashing image ke mobile device

Sistem operasi perangkat mobile diciptakan secara khusus untuk mendukung kemampuan dari perangkat mobile yang digunakan. Secara

umum arsitektur sistem operasi untuk perangkat mobile dapat dilihat pada gambar berikut.



Arsitektur Sitem Operasi Perangkat Mobile

Kegiatan Pengembangan Embedded System Tahun 2014:

- Pelaksanaan Diskusi panel dan workshop yang bersifat hands-on
- Penyempurnaan dan pengembangan fitur-fitur penunjang pada prototype Embedded System melalui kegiatan flashing source code, pengembangan, modifikasi dan uji kernel ke perangkat.
- Kernel customizing dan developing platform image serta product testing

18. Promosi Industri Informatika

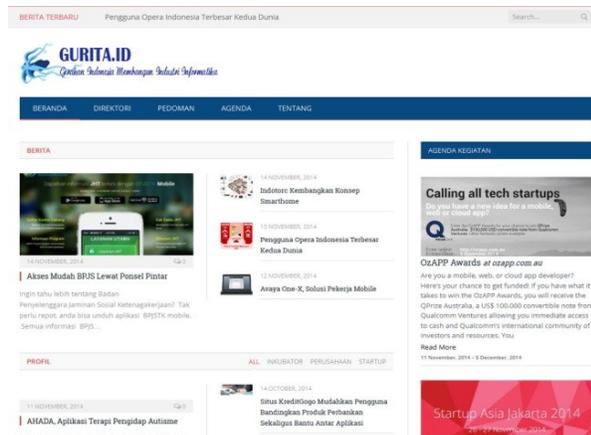
Pengembangan Portal Web GURITA (Gerakan Untuk Membangun Industri Informatika) yang beralamat di <http://gurita.biz.id> dalam rangka pintu gerbang promosi produk-produk industri informatika. Fokus Portal Gurita yakni direktori dari pelaku-pelaku industri TIK lokal, dengan berita dan agenda kegiatan terkait industri TIK sebagai pelengkap yang selama ini masih relatif tersebar. Adapun tantangan pembuatan portal web promosi ini adalah mengumpulkan berbagai pihak untuk mau berkontribusi materi, meng-organisirnya secara teratur, dan menyajikannya secara baik agar menarik dan bermanfaat bagi pengunjung. Sampai dengan tahun 2014 sejumlah pihak telah diundang dan menyatakan dukungannya untuk bekerja sama antara lain : IndonesiaKreatif.net, situs

Dalam mendukung *embedded system*, juga perlu dikembangkan ekosistemnya termasuk pengembangan sebuah *web app store*, yaitu cikal bakal Toko aplikasi mobile Nasional yang pada tahap awal dikembangkan khusus untuk aplikasi berbasis platform Linux. G-Store merupakan wadah berbagai industri aplikasi mobile lokal untuk mempromosikan produknya dan diharapkan akan menjadi toko aplikasi multiplatform Nasional.

promosi industri kreatif dari Kementerian Parekraf; Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI); KLIK Indonesia, StartupBisnis.com, CodePolitan.com, Inkubator Kreasi dan Inovasi Telematika Semarang (IKITAS); dan Inkubator Industri Telematika (I2T) di Bandung dan Yogyakarta. Melalui kegiatan diskusi dengan berbagai pihak, disepakati fitur Portal Gurita merupakan penyajian berita, direktori, dan agenda yang berfungsi link situs asal, direktori berisi informasi perusahaan dan produk-produknya. Fitur tampilan juga merujuk pada portal direktori perusahaan atau produk terkait TIK yang sudah ada seperti: indonetnetwork.co.id, yellowpages.co.id, indotrading.com, infoinfo.co.id, dan software.or.id.



Pelatihan pengisian konten Portal Gurita



Tampilan Portal Promosi Gurita.



Evaluasi Mingguan Kontributor Portal



Mentor Memberikan Pelatihan Jurnalistik

19. Bimtek/Sosialisasi UU ITE dan PP PSTE

Bimtek UU ITE

Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan, penyempurnaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar terciptanya pemahaman UU ITE dan PP ITE di kalangan penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik dan masyarakat dan pengguna sistem elektronik.

Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis UU ITE di berbagai daerah selama Tahun 2009 – 2010 seperti: Aceh (Provinsi Aceh), Medan (Sumatera Utara), Mamuju (Sulawesi Barat), Bengkulu (Provinsi Bengkulu), Palu (Sulawesi Tengah), Malang (Jawa Timur), Pontianak (Kalimantan Barat), Mataram (NTB), Ambon (Maluku), dan Manokwari (Papua Barat), dll. Bimbingan Teknis tersebut diikuti oleh berbagai komponen masyarakat, seperti: Kejaksaan, Polri, Kehakiman, Akademisi, Praktisi TIK, Perbankan, dan Pemda. Selain Kegiatan Bimbingan Teknis di atas, telah dilaksanakan kerjasama dengan berbagai

pihak, yaitu: Pemda Jatim, Akademisi (Politeknik dan UIN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dll.

Tahun 2011 telah dilaksanakan dengan peserta dari masyarakat umum, akademisi, perbankan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Adapun lokasi Bimbingan Teknis Penerapan UU ITE tersebut telah 7 kali, yaitu di Jayapura, Manado, Ende, Banjarmasin, Pekalongan, Bukit Tinggi, dan Tanjung Pinang.

Pada **tahun 2012** Bimbingan Teknis UU ITE kepada aparat penegak hukum dan masyarakat telah dilaksanakan 3 kali di lokasi Kediri, Pangkal Pinang, dan Universitas YAI Jakarta dengan jumlah peserta 300 orang. Bimbingan Teknis UU ITE di Kota Kediri dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, pada 16 Februari 2012.

Bimbingan Teknis UU ITE kedua dilaksanakan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 21 Maret 2012. Penyelenggaraan Bimtek tersebut bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Bimbingan Teknis Ketiga UU ITE dilaksanakan di Universitas YAI Jakarta pada

tanggal 12 April 2012. Acara tersebut dihadiri oleh 100 mahasiswa dan akademisi Universitas YAI.

Sosialisasi UU ITE **Tahun 2013** dilaksanakan di Kupang, bekerjasama dengan Polda NTT (peserta 125 orang).



Bimtek dan Mootcourt UU ITE, Bandung, 2014

Sosialisasi PP PSTE

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) pada telah dilaksanakan 2 kali di Jakarta selama **Tahun 2012** dengan jumlah peserta 280 orang. Sosialisasi pertama dilakukan bagi seluruh Pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 21 November 2012. Acara tersebut dihadiri sekitar 100 pejabat. Beberapa pertanyaan yang mengemuka adalah terkait kesiapan Kementerian Kominfo dalam menyiapkan RPM amanat PP PSTE, termasuk RPM mengenai Tenaga Ahli.

Sosialisasi kedua PP PSTE dilaksanakan di Hotel Riz Carlton Mega Kuningan pada

tanggal **26 November 2012**. Acara tersebut dihadiri sebanyak 180 peserta dari berbagai instansi dan pemangku kepentingan, antara lain pejabat-pejabat dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, asosiasi IT, pelaku perbankan, penyelenggara telekomunikasi, pelaku industri TIK, dan juga pemerintah daerah. Pertanyaan yang mengemuka antara lain mengenai keterlambatan pengundangan PP PSTE yang melampaui waktu 2 (dua) tahun sebagaimana amanat UU ITE, dan perihal konsultasi publik terhadap naskah RPP PSTE.

Bimtek PP PSTE **Tahun 2013** telah dilaksanakan sebanyak 9 kali yaitu:

1. Bali bekerjasama dengan Lembaga Kajian Hukum Teknologi UI (peserta 100 orang)
2. Medan, bekerjasama dengan BI Medan dan BBPKI Medan (peserta 100 orang)
3. Surabaya, bekerjasama dengan APJII (peserta 100 orang)
4. Jakarta, bekerjasama dengan Mastel (peserta 100 orang)
5. Makassar, bekerjasama dengan OJK (peserta 125 orang)
6. Bandung, bekerjasama dengan idEA (peserta 125 orang)
7. Yogyakarta, bekerjasama dengan PANDI (peserta 150 orang)
8. Balikpapan, bekerjasama dengan Dishubkominfo (peserta 125 orang)
9. Palembang, bekerjasama dengan Pemprov Sumsel (peserta 125 orang)



Bimtek UU ITE dan PP PSTE, Mei 2014

Pada Tahun 2014, Bimtek UU ITE dan PP PSTE telah dilaksanakan sebanyak 10 kali yaitu :

- 1) Denpasar Bali, PP PSTE, 17 Maret 2014 (Mitra: LKHT FH UI);
- 2) Tarakan, 29 April 2014, UU ITE/PP PSTE (Dishubkominfo Prov Kaltara);
- 3) Surakarta, 20 Mei 2014, PP PSTE (Dishubkominfo Kota Surakarta);
- 4) Padang, 26 Mei 2014, UU ITE/PP PSTE (Dishubkominfo Kota Padang);
- 5) Manado, 4 Juni 2014, PP PSTE (Dishubkominfo Prov Sulut);
- 6) Kupang, 11 Juli 2014, UU ITE (Dishubkominfo Kabupaten Kupang);
- 7) Bandung, 30 September 2014, UU ITE, (FH Unpad);
- 8) Bau-bau, 27 Oktober 2014, UU ITE, (Badan Komunikasi Informasi);
- 9) Banda Aceh, 22 Oktober 2014, PP PSTE (Dishubkominfo); dan
- 10) Sorong, 15 Nov & 17 Nov 2014, UU ITE, (Dishub).

D. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Ditjen Aptika Tahun 2014

Pada tahun 2014 Ditjen Aptika mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 151.983.609.000,- (Setelah Revisi-08 + Tunjangan Kinerja + Hibah + GPOBA) dan dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan:

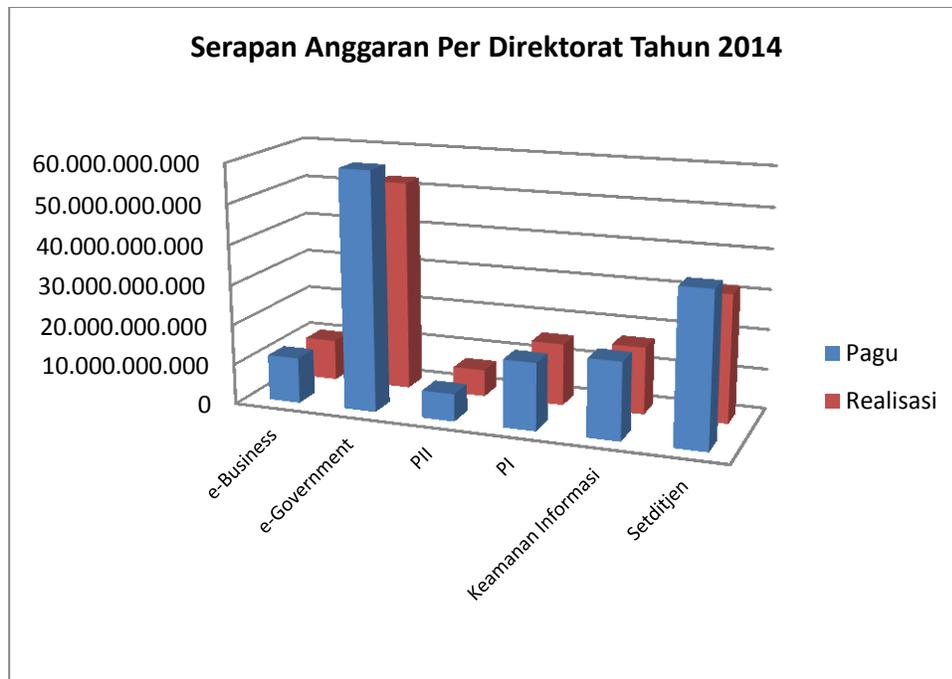
1. Pembinaan dan Pengembangan e-Business sebesar Rp. 11.346.112.000,-;
2. Pembinaan dan Pengembangan e-Government sebesar Rp. 59.326.933.000,- termasuk PHLN ICT Yogya sebesar Rp. 41.837.241.000,-;
3. Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika sebesar Rp. 6.757.772.000 ,-;
4. Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.

- 17.416.463.000,- termasuk PHLN Hibah GPOBA sebesar Rp. 3.294.372.000,-;
5. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik sebesar Rp. 19.151.271.000,-;
 6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sebesar Rp. 37.985.058.000,-.

Sampai dengan akhir Desember 2014 Ditjen Aptika merealisasikan anggaran (termasuk PHLN) sebesar **Rp. 133.377.895.892,-** atau sebesar **87.76%**. Adapun realisasi per Direktorat adalah sebagai berikut :

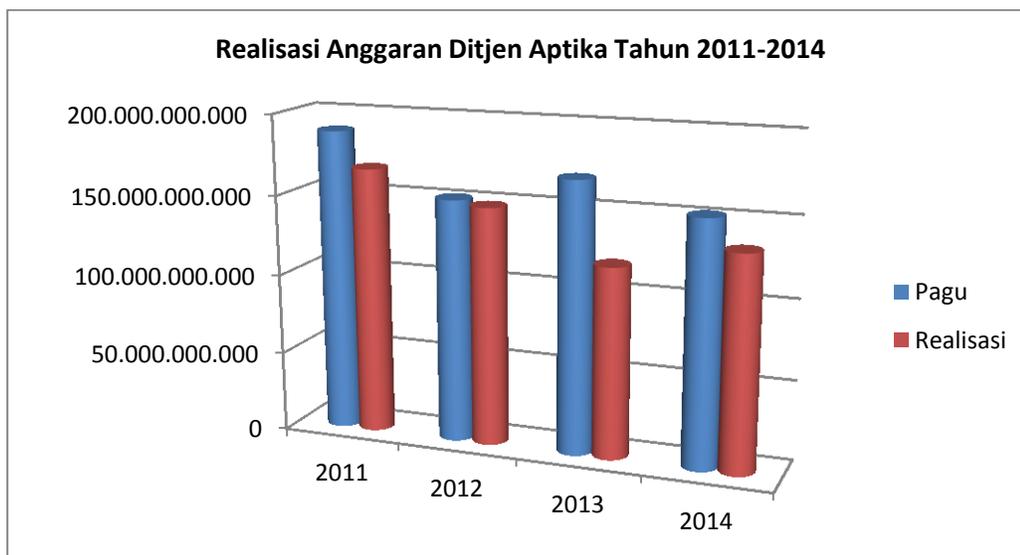
Realisasi Anggaran Ditjen Aptika Tahun 2014

Direktorat	Pagu	Realisasi	%
e-Business	11.346.112.000	10.172.117.480	89,65
e-Government	59.326.933.000	52.652.516.592	88,75
Pemberdayaan Industri Informatika	6.757.772.000	6.631.238.810	98,13
Pemberdayaan Informatika	16.676.713.000	15.456.372.398	88,75
Keamanan Informasi	19.151.271.000	16.698.126.481	87,19
Setditjen	37.985.058.000	31.767.524.131	83,63



Realisasi anggaran Ditjen Aptika tahun 2013 (termasuk PHLN) adalah sebesar Rp. 118.614.262.994,- atau sebesar 70,28% dari pagu sebesar Rp. 168.768.920.000, sedangkan realisasi anggaran tahun 2012 adalah sebesar

Rp. 148.326.456.413 (97,92) dari pagu sebesar Rp. 151.477.461.000. Untuk tahun 2011, pagu anggaran Ditjen Aptika adalah sebesar Rp. 188.738.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. 166.683.060.454 (90,72).



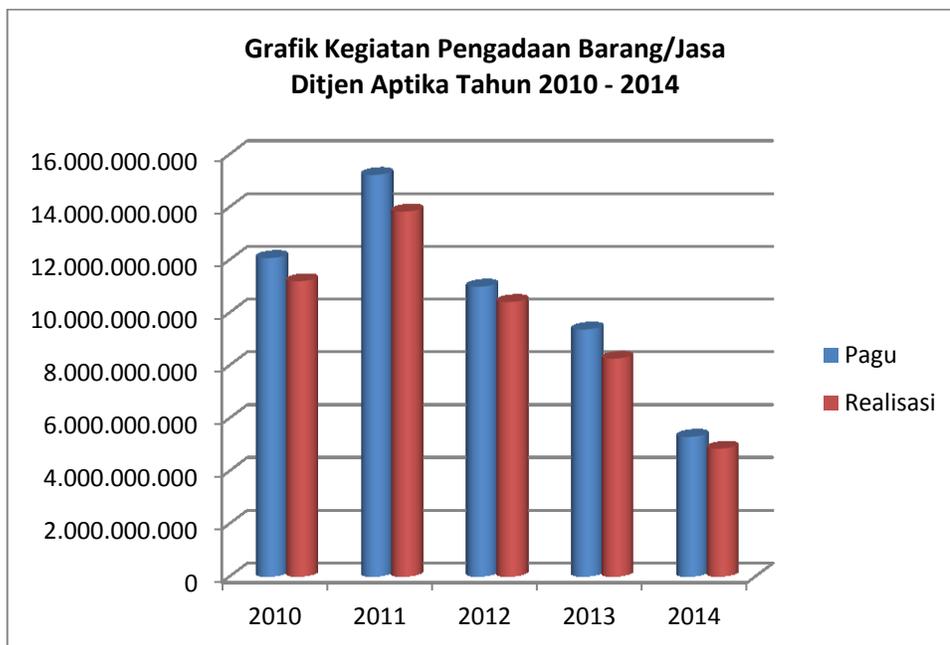
E. Efisiensi Anggaran

Selama tahun 2014, telah dilaksanakan sembilan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan total pagu sebesar Rp. 5.291.909.000,- dan telah terealisasi sebesar

Rp. 4.843.438.071,- dengan efisiensi sebesar Rp. 448.470.929,-. Adapun perbandingan efisiensi pengadaan barang/jasa Ditjen Aptika sejak tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Ditjen Aptika

Tahun	Pagu	Realisasi	Efisiensi
2010	12.068.890.800	11.190.527.038	878.363.762
2011	15.217.335.000	13.830.066.094	1.387.268.906
2012	10.982.338.800	10.403.202.537	579.136.263
2013	9.360.381.000	8.257.415.381	1.102.965.619
2014	5.291.909.000	4.843.438.071	448.470.929



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kegiatan tahunan. Untuk tahun 2014 merupakan Laporan Instansi yang ke-10. Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) berdiri sesuai Keputusan Presiden Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara R.I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.15 Tahun 2005. Depkominfo kemudian diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak berlaku UU No 39/2008 yang dipertegas melalui Peraturan Presiden No 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang pada awalnya Ditjen Aplikasi Telematika sebagai Satuan Kerja di Kemkominfo berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 wajib menyusun laporan Kinerja ini.

Ada beberapa permasalahan terhadap beberapa kegiatan dan capaian kinerja Ditjen Aptika Tahun 2014 ini terkait dengan pelaksanaan teknis pekerjaan. Akan tetapi, akuntabilitas kinerja seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa capaian kinerja telah sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Aptika, namun ada yang masih pada tataran output. Untuk mencapai outcome dampak yang dirasakan oleh masyarakat perlu diadakan evaluasi dan penelitian lapangan (survey) lebih lanjut.

Pada umumnya, target kinerja Ditjen Aptika yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kerja (PK) Ditjen Aptika tahun 2014 telah tercapai. Untuk indikator nilai rata-rata e-Government nasional tercapai 86,6% dan jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-Business tercapai

100% dari target 300 UKM. Khusus untuk indikator jumlah penyelenggara layanan publik yang mengikuti penerapan standar keamanan informasi tercapai melebihi target yaitu sebesar 105%. Meskipun demikian, kinerja Ditjen Aptika pada umumnya hanya pada tataran kinerja *output* dan belum pada tataran *outcome*.

Selanjutnya, penetapan sasaran-sasaran strategis di dalam kerangka pencapaian tujuan Ditjen Aptika (5 tahun-an) perlu diperbaiki sehingga dapat menunjukkan arah yang lebih jelas dalam menuntun setiap langkah Ditjen Aptika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat dijabarkan lebih jelas dalam Perjanjian Kerja yang bersifat lebih mengikat.

Hal ini sedang dilaksanakan beriringan dengan penyusunan Rencana Strategis Ditjen Aptika Tahun 2015-2019 yang disusun berdasarkan RPJMN. Indikator-indikator kinerja yang digunakan juga mengalami penyempurnaan karena merupakan target yang diperjanjikan antara Direktur dan Direktur Jenderal dan disertai target yang disepakati untuk dicapai.

LKIP Tahun 2014 ini kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Ditjen Aptika, laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Heru Tjahjono
Jabatan : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tifatul Sembiring
Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Komunikasi dan Informatika

Tifatul Sembiring

Jakarta, Februari 2014
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Bambang Heru Tjahjono

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

Unit Organisasi Eselon I
Tahun Anggaran

: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
: 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan e-Government secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (M.3 S.1)	Nilai rata-rata e-Government Nasional	3,0
Terwujudnya layanan e-business yang aman, mudah, murah, handal dan terpercaya di masyarakat baik lingkup domestik maupun internasional (M.3 S.2)	Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-Business	300 UKM
Terselenggaranya fasilitasi dan proses edukasi yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi (M.2 S.1)	Jumlah instansi pemerintah yang mengikuti kegiatan pemeringkatan Indeks KAMI	80 Instansi

Jumlah Anggaran :

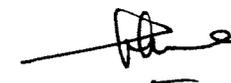
Program Pengembangan Aplikasi Informatika : Rp. 116.127.800.000,-

Menteri Komunikasi dan Informatika

Tifatul Sembiring

Jakarta, Februari 2014

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika



Bambang Heru Tjahjono